

**PENGARUH ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN
PENDUDUK DI INDONESIA**

**SUGIARTI
8125087878**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2012**

***INFLUENCE OF EDUCATION AND UNEMPLOYMENT RATE
TO POVERTY POPULATION IN INDONESIA***

**SUGIARTI
8125087878**



Skripsi is written as part of bachelor degree in education accomplishment

**STUDY PROGRAM OF ECONOMIC EDUCATION
CONCENTRATION COORPERATION ECONOMIC
EDUCATION
FACULTY OF ECONOMIC
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2012**

ABSTRAK

SUGIARTI. *Pengaruh antara Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Penduduk Di Indonesia.* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2012.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, kemiskinan dan pengaruh antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia, (2) untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia, (3) untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia. Penelitian dilakukan di 33 propinsi di Indonesia tahun 2006-2010. Penelitian ini menggunakan metode Ekspos Facto. Dalam penelitian ini, data yang digunakan yakni data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan data pendukung lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan estimasi Fixed Effect Model (FEM) pada program Eviews6, serta menggunakan program Excel dan SPSS.

Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel dengan persamaan $\hat{Y} (KM) = 28,114 - 2,202 (PD) + 0,6776 (PG)$ menunjukkan bahwa : (1) variabel pendidikan yang diproksi dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan mempunyai nilai t-statistic sebesar -9,235 serta memiliki koefisiennya sebesar 2,202, (2) variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia dan mempunyai nilai t-statistic sebesar 17,519 serta memiliki koefisien sebesar 0,6776, (3) kedua variabel independen mampu menjelaskan keragaman nilai pada variabel persentase kemiskinan dengan nilai *R-Square* sebesar 0,9902.

Kata kunci : Kemiskinan, Pendidikan, Pengangguran

ABSTRACT

SUGIARTI. *Influence of Education and Unemployment Rate To Poverty Population In Indonesia. Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2012.*

This study aimed (1) to describe the level of education, unemployment, poverty and the influence of educational level and unemployment on poverty population in Indonesia, (2) to determine the effect of educational level of the poverty population in Indonesia, (3) to determine the effect of the unemployment on poverty population in Indonesia. The study was conducted in 33 provinces in Indonesia in 2006-2010. This study uses Expose Facto. In this study, the data used the secondary data is data obtained from the Central Bureau of Statistics Indonesia and other supporting data. The analytical method used is panel data analysis using the Fixed Effects Model estimates (FEM) in Eviews6 program, and using Excel and SPSS program.

The results of this study was obtained value of the regression coefficients for each variable to the equation $Y (KM) = 28.114 - 2.202 (PD) + 0.6776 (PG)$ shows that: (1) variable diproksi education with an average length of the school and the negative effect have a significant impact on poverty and the t-statistic value of -9.235 and has a coefficient of 2.202, (2) unemployment variable has positive and significant impact on poverty population in Indonesia and has a t-statistic value of 17.519 and has a coefficient of 0.6776, (3) two independent variables can explain the diversity of value to a variable percentage of poverty to the value of R-Square of 0.9902.

Key words : Poverty, Education, Unemployment

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kadang perjuangan tak harus selalu bersama,
jika aku harus berjuang sendiri..maka izinkan aku berjuang bersama doa-doaku..
“So find happiness inside you”

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

(QS:al-An'am: 162)

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

MAN JADDA WAJADA

“Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil”

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga besar saya dan orang terdekat yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang dengan sepenuh hati.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi**



Dra. Nurahma Hajat, M.Si
NIP. 19531002 198503 2 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Dr. Haryo Kuncoro, SE, M.Si</u> NIP. 197002007 200812 1 001	Ketua		<u>06/08-2012</u>
2. <u>Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd</u> NIP.19530320 198203 2 001	Sekretaris		<u>02/08-2012</u>
3. <u>Dr. I Ketut R. Sudiarditha, M.Si</u> NIP.19560207 198602 1 001	Penguji Ahli		<u>02/08-2012</u>
4. <u>Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si</u> NIP. 19720114 199802 2 001	Pembimbing I		<u>27/07-2012</u>
5. <u>Ari Saptono, SE, M.Pd</u> NIP. 19720715 200112 1 001	Pembimbing II		<u>02/08 2012</u>

Tanggal Lulus : 17 Juli 2012

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2012

Yang membuat pernyataan



Sugiarti

No.Reg. 8125087878

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Antara Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penanggungan Terhadap Kemiskinan Penduduk Di Indonesia. Skripsi ini disusun oleh peneliti dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi pada jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Satu sekaligus sebagai Ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
2. Bapak Ari Saptono, SE, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Dua sekaligus sebagai Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi UNJ.
3. Bapak Dr. Saparuddin, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi UNJ.
4. Ibu Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNJ.
5. Ayah Sagin, ibu Rogayah dan seluruh keluarga besar (Kakak, Adik, Tante, Om dan Aa) peneliti yang telah memberikan motivasi dan doa restu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi UNJ yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Teman-teman dari Ekonomi Koperasi 2008 yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi.
8. Teman-teman dari Ekonomi Koperasi 2006 dan 2007 yang telah memberi saran mengenai proses penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman lain yang membantu memberikan motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Petugas perpustakaan Universitas Indonesia, petugas LIPI dan petugas perpustakaan Badan Pusat Statistik Pusat yang membantu dalam proses observasi peneliti.

Terima kasih untuk dukungan selama masa skripsi ini para sahabat terdekat (d'leadest) Marida Manihuruk, Gina Febri, Rohani Finella, Linca Azri Naomi, Yulianti Margareta dan Mariana Monica. Kalian sahabat terbaik selama menjadi mahasiswa Ekop Non Reg 2008.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti dengan hati lapang akan menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 17 Juli 2012

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TITLE	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	13
D. Perumusan Masalah	14
E. Kegunaan Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PERUMUSAN MASALAH	
A. Deskripsi Teoretis.....	16
1. Kemiskinan	16
2. Tingkat Pendidikan	25
3. Tingkat Pengangguran	33
B. Penelitian Terdahulu.....	43
C. Kerangka Berpikir	45
D. Perumusan Hipotesis.....	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
C. Metode Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	52
1. Tingkat Pendidikan.....	52
a. Definisi Konseptual	52
b. Definisi Operasional	52
2. Tingkat Pengangguran.....	53
a. Definisi Konseptual	53
b. Definisi Operasional	53
3. Kemiskinan	54
a. Definisi Konseptual	54
b. Definisi Operasional	54
F. Korelasi Hubungan Antar Variabel.....	54
G. Teknik Analisis Data	55
1. Metode Analisis	55
a. Analisis Data Panel.....	55
b. Estimasi Model.....	57
c. Penyeleksian Model Estimasi Data Panel.....	58
2. Pengujian Asumsi Klasik	62
a. Uji Heterokedastisitas.....	63
b. Uji Autokolinearitas	64
c. Uji Normalitas.....	65
d. Uji Multikolinearitas.....	67
3. Pengujian Kriteria Statistik	68
a. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F).....	68
b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t).....	69
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R-squared)....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	72
1. Kemiskinan	72
2. Tingkat Pendidikan	76
3. Tingkat Pengangguran	79
B. Analisa Data	82
1. Estimasi Model	82
2. Pemilihan Model Terbaik.....	83
3. Pengujian Asumsi Klasik	85
a. Uji Heterokedatisitas.....	85
b. Uji Autokolinearitas.....	86
c. Uji Normalitas.....	86
d. Uji Multikolinearitas.....	87
4. Pengujian Kriteria Statistik.....	87
a. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F).....	87
b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t) ...	88
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji <i>R-Square</i>).....	89
C. Interpretasi Hasil Penelitian	90
D. Keterbatasan Hasil Penelitian	94

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan	95
B. Implikasi	96
C. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel I.1	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2006-2010	6
Tabel I.2	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2009-Maret 2010.....	7
Tabel I.3	Angka Melek Huruf Di Indonesia Tahun 2006-2010.....	9
Tabel 1.4	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Di Indonesia Tahun 2006-2010	9
Tabel I.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia 2010.....	10
Tabel I.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008–2010	11
Tabel II.1	Jenjang Pendidikan Lama Sekolah Yang Digunakan Untuk Menghitung Rata-Rata Lama Sekolah	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar I.1	Persentase Kemiskinan di Indonesia.....	3
Gambar II.1	Lingkaran Kemiskinan (<i>Vicious Circle Nurkse</i>)	24
Gambar II.2	Desain Penelitian	47
Gambar IV.1	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006-2010.....	72
Gambar IV.2	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2006-2010	74
Gambar IV.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2006-2010	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1	Tabel Persentase Penduduk Miskin per Provinsi 2006-2010.....	102
Lampiran 2	Tabel Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi 2006-2010	103
Lampiran 3	Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 2006-2010	104
Lampiran 4	Model Common Effect	105
Lampiran 5	Fixed vs Common.....	108
Lampiran 6	Signifikansi Random Effect (Common vs Random)	109
Lampiran 7	Uji Hausman (Fixed vs Random).....	110
Lampiran 8	Model Terbaik	111
Lampiran 9	Uji Heterokedastisitas (LM).....	113
Lampiran 10	Uji Autokolerasi	116
Lampiran 11	Uji Normalitas	118
Lampiran 12	Uji Multikolinearitas	119
Lampiran 13	Uji F.....	120
Lampiran 14	Uji-t.....	121
Lampiran 15	Koefisien Determinasi	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 6% per tahun belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin masih tinggi, yang saat ini berkisar 31 juta jiwa atau 13% pada tahun 2010. Studi dari Bank Dunia dikutip dari Sri Liani Suselo dan Tasidim menyebutkan bahwa “hampir 50% dari jumlah penduduk Indonesia dikategorikan miskin dan berada di ambang kemiskinan”¹. Hal ini menjadikan permasalahan kemiskinan patut mendapat perhatian besar dari semua pihak.

Menurut Nasikun dalam Ginanjar Kartasasmita, kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan:

kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumber daya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar².

Hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap.

¹ Sri Liani Suselo dan Tasidim, “Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Moneter*, Vol. 11, No. 2, Juni 2008, pp. 157-181.

² Ginanjar Kartasasmita, *Kemiskinan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), p. 27

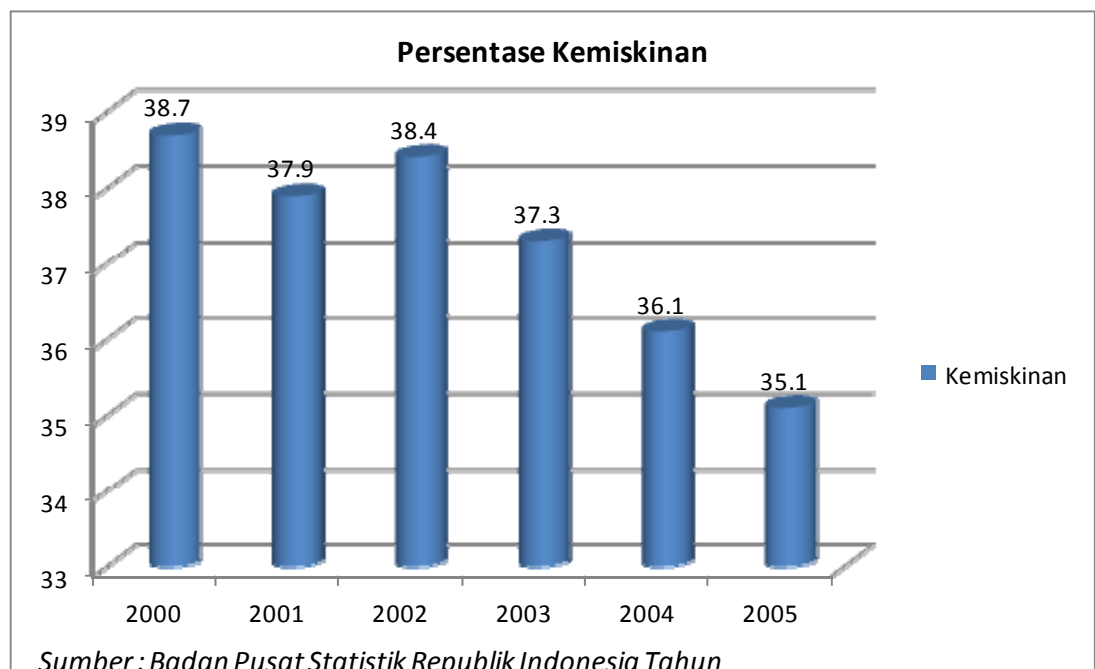
Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya ketimpangan pendapatan antar daerah. kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena tingginya angka pengangguran, meningkatnya pengangguran terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat (teori Nurkse) dan telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia.

Masalah kemiskinan terjadi karena adanya kekurangan akan kebutuhan pangan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya fasilitas layanan kesehatan serta kesempatan kerja yang mana semua unsur tersebut saling berkaitan sehingga mengakibatkan kualitas hidup menjadi rendah atau tidak tercukupinya kebutuhan hidup.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting, tercantum dalam GBHN 2000-2004 dan Propenas 2001-2004 yang menyatakan bahwa pemerintah mengindikasikan masalah kemiskinan sebagai salah satu masalah utama pembangunan nasional. Dalam kedua dokumen tersebut disebutkan bahwa pembangunan pada hakekatnya adalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Menurut *World Bank* tahun 2004, sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Dalam programnya seperti meningkatkan mutu pendidikan, fasilitas kesehatan yang memadai, serta penyediaan lapangan pekerjaan, Zainuddin Basri dalam Ravi Wijayanto, “pemerintah secara kuantitatif telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta (40,1%) pada tahun 1976 menjadi 34,01 juta (11,3%) pada tahun 1996”³.



Gambar I.1 Persentase Kemiskinan di Indonesia

Setelah puncak krisis dilalui dan ekonomi mulai pulih, angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kembali turun. Pada tahun 2000 tingkat kemiskinan masih sebesar 38,70 juta jiwa atau 19%. Di tahun

³ Ravi Dwi Wijayanto, *Pengaruh PDRB dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan* (Semarang : Universitas Diponegoro), p.3.

2002 angka kemiskinan naik dari 16% menjadi 17,8%. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) “kenaikan tingkat kemiskinan saat itu sangat dipengaruhi oleh tingginya inflasi yang disebabkan kombinasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan gejolak harga pangan, terutama beras”⁴.

Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI) menggambarkan bahwa, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Kegiatan pembangunan diarahkan pada pembangunan daerah, khususnya daerah yang angka kemiskinannya terus naik dari waktu ke waktu.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2000, Indonesia memiliki 205 juta lebih penduduk. Sensus Penduduk pada tahun 2010, penduduk meningkat sebesar 32 juta penduduk atau menjadi 237 juta jiwa. Dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 3,2 juta orang per tahun atau, 266 ribu orang perbulan atau 9.142 orang perhari atau 380 orang per jam atau 6 orang per menit. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Jumlah penduduk yang tidak bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

⁴ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, “Angka Kemiskinan”, *Berita TNP2K*, November 2010, p. 2.

Pembangunan di masing-masing provinsi di Indonesia, pemerintah serius melakukan pembangunan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah sejalan dengan pembangunan nasional yang ditetapkan. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. “Hal ini menjelaskan bahwa salah satu kriteria utama pemilihan sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin”⁵.

Terbitan statistik Indonesia tahun 2010 menunjukkan tingkat kemiskinan di tiga puluh tiga provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya. Peringkat pertama ditempati oleh Provinsi Papua dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 37.99 persen, peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Irian Jaya Barat dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 36.26 persen, peringkat ketiga ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 24.88 persen. Provinsi yang baru disahkan, Banten dengan rata-rata tingkat kemiskinan 8 persen dan Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 4 persen sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah.

⁵ Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, “Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan”, *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 51, No. 3, Maret 2003, pp. 191 – 324.

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
di Indonesia Tahun 2006-2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
2006	39.300.000	17,8
2007	37.170.000	16,6
2008	34.960.000	15,4
2009	32.530.000	14,2
2010	31.020.000	13,3

Sumber : BPS-RI tahun 2010

Melihat data kemiskinan seperti di atas, jelas bahwa sejak dilakukannya sensus penduduk miskin tahun 1976 sampai sekarang ini sebenarnya besar kecil jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penduduk miskin, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Pada umumnya komponen GKM (komoditi makanan kebutuhan pokok) manusia memegang peranan lebih besar dibandingkan dengan GKBM (sandang, papan, perumahan, dan kesehatan).

Tabel I.2
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2009-Maret 2010

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp)
Perkotaan			
Maret 2009	11.910.000	10,72	222.123
Maret 2010	11.100.000	9,87	232.989
Perdesaan			
Maret 2009	20.620.000	17,35	179.835
Maret 2010	19.930.000	16,56	192.354

Sumber : Berita Resmi Statistik Indonesia 2010 (Data diolah dari Susenas)

Dalam kurun waktu setahun terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun sebesar 0,79 persen sedangkan di daerah perkotaan turun 0,85 persen. Secara absolut selama periode Maret 2009 – Maret 2010, penduduk miskin di pedesaan berkurang 690.000 orang sementara di perkotaan turun sebanyak 810.000 orang.

Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian tahun 1995 yang dilakukan pada tujuh belas provinsi di Indonesia. Propinsi tersebut antara lain: Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya. Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan masyarakat pedesaan di

Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya penerapan teknologi yang ditunjukkan dengan rendahnya penggunaan *input* serta mekanisme pertanian yang diterapkan.

Menurut Sahdan dalam Nasir, Sachudin dan Maulizar, menyebutkan variabel penyebab kemiskinan antara lain : pendidikan yang rendah, rendahnya mutu kesehatan, kepemilikan alat produktif yang terbatas, rendahnya penguasaan teknologi. M. Dawam Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Menuju Indonesia Sejahtera” juga menyebutkan diantaranya adalah kualitas pendidikan dan tingkat pengangguran. Kemiskinan disebabkan karena menganggur akibat pendidikan yang rendah, sehingga tidak memperoleh penghasilan

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu daerah. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai *skill* atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

Indikator pendidikan di Indonesia yang direpresentasikan oleh angka melek huruf (AMH). Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa Angka Melek Huruf di Indonesia meningkat di tahun 2007 dengan 91,87% dari tahun 2006 sebesar 91,45%. Peningkatan angka melek huruf hanya 0,42% persen selama 1 tahun, hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan angka melek huruf.

Tabel I.3
Angka Melek Huruf Di Indonesia Tahun 2006-2010

Tahun	% Angka Melek Huruf
2006	91,45
2007	91,87
2008	92,19
2009	92,59
2010	92,91

Sumber : BPS – Susenas (2006-2010)

Indikator tingkat pendidikan selain angka melek huruf untuk mengukur pendidikan penduduk di suatu wilayah adalah dengan menggunakan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan Tabel 1.4 rata-rata lama sekolah di Indonesia meningkat dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dikarenakan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar. Komitmen pemerintah diperlukan untuk mewujudkan jangka panjang Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Tabel 1.4
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Di Indonesia Tahun 2006-2010

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
2006	7.4
2007	7.5
2008	7.5
2009	7.7
2010	7.9

Sumber : BPS-RI 2010

Selain faktor teknologi dan pendidikan, masalah kemiskinan dari tahun ke tahun adalah masih tingginya jumlah angka pengangguran. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud.

Tabel I.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia 2010

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2006	10,28
2007	9,11
2008	8,39
2009	8,14
2010	7,41

Sumber :Berita Resmi Statistik-BPS RI Berbagai Periode

Tingkat pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Indikator yang biasa digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang didalamnya terdapat pengangguran sukarela yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan tabel I.5, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 cenderung menurun.

Jumlah pengangguran pada Februari 2010 mencapai 8,59 juta orang atau 7,41 persen dari total angkatan kerja. Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung menurun, dimana TPT Februari 2010 sebesar 7,41 persen turun dari TPT Februari 2009 sebesar 8,14 persen. Pada periode 2010, TPT untuk pendidikan Diploma mendominasi, yaitu sebesar 15,71 persen.

Jika dibandingkan keadaan Februari 2009 TPT untuk semua tingkat pendidikan mengalami penurunan, kecuali TPT untuk tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,33 persen dan 1,3 persen, hal ini diduga karena lapangan kerja yang tersedia belum mensyaratkan pendidikan tinggi. Tahun 2010, TPT untuk pendidikan Diploma mendominasi, yaitu sebesar 15,71 persen.

Tabel I.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008–2010

Pendidikan yang Ditamatkan	2008	2009	2010
SD Kebawah	4,70	4,51	3,71
SMP	10,05	9,38	7,55
SMA	13,69	12,36	11,90
SMK	14,80	15,69	13,81
Diploma I/II/III	16,35	15,38	15,71
Universitas	14,25	12,94	14,24
Total	8,46	8,14	7,41

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th. 6 XIII, 10 Mei 2010

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpendapatan tinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional.

Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12% hingga 17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan dikatakan merata⁶.

Ravi Dwi Wijayanto tahun 2010 dalam penelitiannya tentang pengaruh PDRB, pendidikan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa variabel PDRB negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pendidikan juga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dian Oktaviani tahun 2001 dalam analisisnya tentang bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di Indonesia maka jumlah penduduk miskin di Indonesia juga akan semakin bertambah seiring pertambahan jumlah pengangguran. Selain itu Deni

⁶ Dumary, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), p. 15.

Tisna tahun 2008 dengan penelitian yang sama juga menghasilkan hasil yang sama pula, yaitu bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Yang mana penelitiannya menggunakan metode *panel data* tahun 2003 - 2004.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Indonesia dalam periode 2006-2010 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi terjadi peningkatan juga pada tingkat pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah serta penurunan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Karena pentingnya masalah kemiskinan, maka dilakukan penelitian untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi masalah tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kurangnya penerapan teknologi di pedesaan.
- 2) Pendidikan yang masih rendah.
- 3) Tingkat pengangguran yang masih tinggi.
- 4) Distribusi pendapatan yang tidak merata.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata masalah kemiskinan di Indonesia memiliki penyebab yang luas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada “Pengaruh antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan”.

D. Perumusan Masalah

Kemiskinan adalah masalah penting bagi setiap negara, selain itu masalah kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi suatu daerah serta menilai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara termasuk Indonesia.

Salah satu masalah dalam kemiskinan yakni adanya peningkatan pendidikan yang dipresentasikan dari rata-rata lama sekolah. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah tidak menjadikan kemiskinan di Indonesia menurun secara pesat. Kondisi lainnya yakni tingkat pengangguran yang juga masih menjadi masalah di Indonesia juga tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan?
- 2) Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pengangguran terhadap kemiskinan?
- 3) Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan

E. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoretis, untuk melatih dan mengembangkan kerangka berpikir ilmiah dan menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah,

sekaligus untuk menambah bahan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan setiap program pembangunan.

- 2) Kegunaan Praktis, Lembaga atau institusi pendidikan adalah sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi penelitian berikutnya. Kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Ekonomi dan Admisitrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada khususnya sebagai bahan referensi yang tertarik dalam bidang kajian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoretis

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan dan papan yang mana dalam pandangan ini adalah orang miskin yang tinggal di dalam kawasan kumuh dan pedesaan yang terisolir. Pendapat lain yang lebih luas adalah “bahwa kemiskinan menyangkut faktor sosial, budaya dan lingkungan”⁷.

Menurut *World Bank* “penduduk yang dapat dikatakan miskin adalah yang pendapatannya di bawah US\$ 1 per hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah US\$ 2 per hari”⁸. *World Bank* mendefinisikan kemiskinan itu sendiri adalah :

*The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other*⁹.

Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala

⁷ M. Dawam Rahardjo, *Menuju Indonesia Sejahtera* (Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), p. 7.

⁸ *Ibid*, p. 12.

⁹ Prima Sumarga, “Analisis Penyebab Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2 No. 2, Maret 2001, pp. 35-62.

macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Menurut Chambers dikutip dari Adit Agus Prasetyo menerangkan bahwa,

kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu : 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), 5) keterasingan (isolation) baik secara grafis maupun sosiologis¹⁰.

Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan \$1 dolar/hari telah berkurang separuh.

Menurut Quibria dalam Adit Agus Prasetyo mengatakan,

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang berada dalam suatu kondisi yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yakni kebutuhan pangan, pakaian dan tempat tinggal, dengan asumsi bahwa konsep kemiskinan ini bersifat *time and societyspecific*, artinya tidak berlaku universal karena konkret masin-masing masyarakat, kurun waktu memiliki ukuran yang berbeda tentang kemiskinan¹¹.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun minuman. Sedangkan menurut Bradley

¹⁰ Adit Agus Prastyo, *Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), p. 12.

¹¹ *Ibid.*, p. 18.

dan Schiller dalam Hendra Wahyudi dan Sismudjito “kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas”¹².

Menurut Andre Bayo Ala,

kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya kebutuhan manusia itu bermacam – macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek antara lain : Aspek Primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan ; dan, Aspek sekunder berupa jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi¹³.

Untuk mengkaji kompleksitas persoalan kemiskinan yang bersifat multidimensional, Djamluddin Ancok dalam tulisannya “Pemanfaatan Organisasi Lokal Untuk Mengentaskan Kemiskinan” mengemukakan tiga pendekatan masalah kemiskinan yakni : “pendekatan kultural, pendekatan situasional (pendekatan struktural) dan pendekatan interaksional”¹⁴.

M. Dawam Rahardjo dalam bukunya menerangkan bahwa tokoh utama yang menggunakan pendekatan kultural adalah Oscar Lewis¹⁵. Dengan konsep *cultural poverty*, Lewis berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi (*economic deprivation*) yang berlangsung lama. Ciri-cirinya antara lain : sistem perekonomian berorientasi pada mencari keuntungan, rendahnya upah, tidak ada organisasi sosial, politik dan

¹² Hendra Wahyudi dan Sismudjito, “Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Keluarga Miskin”, *Jurnal Harmoni Sosial*, Vol. 1 No. 2, Januari 2007, pp. 83-95.

¹³ Andre Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan* (Yogyakarta : Liberty, 1996), p. 10.

¹⁴ Djamluddin Ancok, *Pemanfaatan Organisasi Lokal Untuk Mengentaskan Kemiskinan*, Suntingan Ririn Handayani (Jakarta: Khanata, 2006), p. 51.

¹⁵ M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit.*, p.12.

ekonomi untuk kaum miskin yang didirikan oleh pemerintah, hadirnya sistem kekeluargaan yang bilateral, dan hadirnya kelas masyarakat yang dominan. Menghilangkan budaya kemiskinan tersebut, Lewis menyarankan agar orang-orang miskin bersatu dalam suatu organisasi.

Charles A. Valentine dalam buku M. Dawam Rahardjo menggunakan asumsi yang berbeda dari asumsi Lewis. Menurut Valentine, untuk mengubah keadaan orang-orang miskin ke arah yang lebih baik harus diadakan perubahan yang simultan dalam tiga hal, yakni “1) penambahan *resources* (kesempatan kerja, pendidikan, dll), 2) perubahan struktur sosial masyarakat, 3) perubahan-perubahan di dalam subkultur masyarakat miskin tersebut”¹⁶.

Ahli lain yang mengajukan pendapatnya tentang kehidupan miskin adalah Herbert J. Gans. Menurut Gans, “perilaku ciri-ciri yang ditampilkan kaum miskin merupakan hasil interaksi antara faktor kebudayaan yang sudah tertanam di dalam diri mereka dan faktor situasi yang menekan”¹⁷. Menurut teori ini orang-orang miskin bersifat heterogen, sebagian orang menjadi miskin karena warisan generasi, dan sebagian lain miskin secara periodik.

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami *capability deprivation* dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning dikutip dari Didit Purnomo

¹⁶ M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit.*, p. 52.

¹⁷ *Ibid.*

“kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan”¹⁸.

kemiskinan muncul ada dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, yang meliputi rendahnya tingkat pendapatan serta buruknya kondisi keluarga. Sementara faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari lingkungan dimana masyarakat tersebut berinteraksi. Adapun faktor kemiskinan yang berasal dari sisi eksternal seperti terbatasnya pasar untuk produk yang mereka hasilkan, sarana transportasi yang kurang memadai, rendahnya aksesibilitas terhadap modal, kualitas sumber daya alam yang rendah, teknologi yang terbatas, dan kelembagaan yang tidak baik.

Bappenas dalam Gregorius Sahdan mendefinisikan “kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak mendasar untuk mempetahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat”¹⁹. Hak-hak dasar masyarakat antara lain : kebutuhan pangan, kesehatan, terbatasnya akses perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, rasa aman dan persamaan derajat, serta lemahnya pasrtisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

¹⁸ Didit Purnomo, “Distribusi Pendapatan di Indonesia : Proses Pemerataan dan Kemiskinan”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2000, pp. 47 – 59.

¹⁹ Gregorius Sahdan, “Menanggulangi Kemiskinan Desa”, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Vol. 1 No. 3, Maret 2005, pp. 33-45.

Pendekatan yang dilakukan Bappenas antar lain pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability*) dan pendekatan obyektif dan subyektif (*objective and subjective approach*).

Pendekatan kebutuhan dasar melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang atau sekelompok dalam memenuhi kebutuhan minimum seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan air bersih. Namun menurut *The World Employment Conference* tahun 1976, “*basic needs* mencakup 1). Kebutuhan keluarga minimal (*minimal family needs*) untuk konsumsi pribadi seperti air bersih, dan 2) pelayanan (*service*) oleh komunitas seperti kesehatan, transportasi dan pendidikan”²⁰.

Pendekatan pendapatan melihat kemiskinan disebabkan rendahnya penguasaan aset dan alat produksi seperti tanah, alat pertanian dan perkebunan sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat. Pendekatan kemampuan dasar melihat kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan membaca dan menulis. Pendekatan obyektif sering disebut dengan pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normati dan syarat yang harus dipenuhi untuk keluar dari kemiskinan, dan pendekatan subyektif

²⁰*The World Employment Conference* tahun 1976 diselenggarakan oleh *International Labour Organization* (ILO) di Geneva, Swiss. Dikutip dari buku Richard and P. J and Thomson, *Basic Needs and Urban Poor*, Terjemahan M. Dawam Rahardjo (Jakarta: Khanata, 2006),p. 9.

melihat kemiskinan berdasarkan pendapat dan pandangan masyarakat miskin sendiri.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin absolut jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Menurut Gunawan Sumodiningrat dikutip dari Suwarno, “kemiskinan relatif jika seseorang telah dapat hidup di atas garis kemiskinan akan tetapi masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya”²¹.

Ada beberapa ukuran yang sudah baku untuk menggambarkan dimensi kemiskinan di Indonesia. Dua diantaranya yang paling umum digunakan adalah : 1) tingkat kemiskinan (*headcount index*) dihitung sebagai proporsi penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan 2) jurang kemiskinan (*poverty gap index*) yang menggambarkan kedalaman kemiskinan dari penduduk miskin.

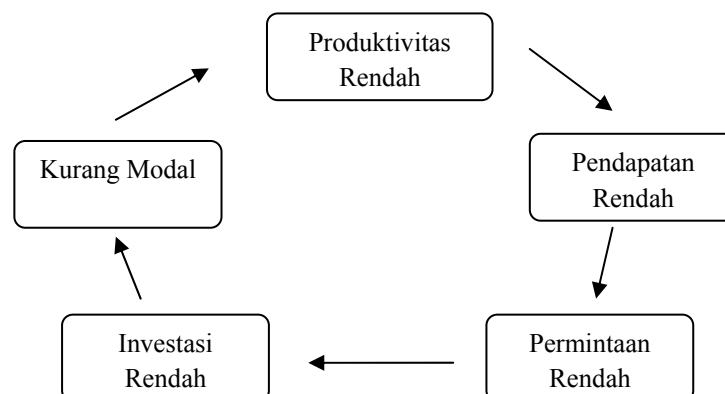
Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010, penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

²¹ Suwarno, *Kemiskinan dan Kesejahteraan* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2008), p. 74.

Todaro menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

(1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri²².

Sedangkan menurut Jhingan, mengemukakan tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian. Kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif. Ketiga, penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.



Gambar II.1

Lingkaran Kemiskinan (*Vicious Circle Nurkse*)

²² Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), p. 32.

Lingkaran setan Nurkse, menjelaskan tentang deretan kekuatan yang melingkar yang saling bereaksi satu sama lain sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total dari negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal yang menyebabkan produktivitas menjadi rendah. Rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah sehingga mengakibatkan investasi berada pada tingkat yang rendah dan kembali menyebabkan modal berkurang. Seperti ungkapan Howard Wriggins dalam Suwarno melihat kemiskinan, “bahwa tak seorangpun hidup dari roti saja. Begitu pula dengan kemiskinan, selain dimensi material juga memiliki dimensi non material”²³. Tingkat pendidikan yang rendah juga bermuara dari pendapatan yang rendah yang menyebabkan produktivitas rendah serta produksi yang rendah juga sehingga berakhir pada pendapatan yang rendah.

Batasan di atas menunjukkan bahwa kemiskinan adalah sebuah kondisi yang berada di bawah nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*) dari kebutuhan yang bersifat materil.

²³ Suwarno, *Op. Cit.*, p. 80.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami berbagai kekurangan (ketidakberdayaan) yakni dengan memiliki pendapatan dibawah Rp 7.000 per hari untuk memperoleh makanan dengan kandungan kalori kurang dari 2.100 per harinya.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip dari Ririn Lestari, pendidikan diartikan sebagai,

proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya²⁴.

Menurut Richey dalam *Planning for teaching, an Introduction to Education* dikutip dari Ririn Lestari menyatakan “Istilah Pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat”²⁵. Hal tersebut terutama membawa warga masyarakat yang baru (generasi baru) bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

²⁴ Ririn Lestari, *Definisi Pendidikan*, 2011, p. 1 (<http://www.rentcost.com/2011/12/pengertian-pendidikan-definisi.html>).

²⁵ *Ibid.*

Pendidikan berkaitan erat dengan kemiskinan. Orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik pula. Karena orang yang berpendidikan tinggi memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Dengan demikian orang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik memiliki peluang yang lebih kecil untuk menjadi miskin dibanding mereka yang berpendidikan rendah.

Pendukung teori modal manusia (*Human Capital*) Adam Smith dikutip dari Randy R. W dan Rianti Nugroho berpendapat bahwa,

manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan yang pendidikannya lebih rendah²⁶.

upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan meningkatkan ekonominya. Teori *human capital* ini diperkuat oleh Becker yang menyatakan “produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan serta kesehatan”²⁷. Teori *Human Capital* ini selanjutnya diperkuat berbagai studi empiris antara lain untuk Amerika Serikat oleh Kendrick.

Tahun 70-an, teori ini mendapat kritik tajam. Argumen yang disampaikan adalah tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan

²⁶ Randy R.W dan Rianti Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010), p. 62.

²⁷ *Ibid*, p. 63.

kualitas pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Ditekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan.

Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. kebodohan dan kemiskinan harus secepatnya diberantas, dan oleh karena itu pula dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci yaitu pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus kemiskinan. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan kemudian dalam ayat 2 ditegaskan: setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan di Indonesia selalu terbentur oleh tiga realitas yang dikutip dari Winardi, yakni “kepedulian pemerintah terhadap pendidikan rendah dibandingkan politik, penjahajahan terselubung, dan kondisi masyarakat yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan”²⁸.

²⁸ Winardi, *Pendidikan Di Indonesia*, 2010, p. 1 (<http://andalasvanjava-online.com/pendidikan-indonesia/january2010/htm>).

Kecemasan yang sederhana namun penuh makna, dalam masyarakat di Indonesia dapat dilihat adanya pengabaian sistematis terhadap kondisi pendidikan. Istilah Karl Marx yang di populerkan oleh Ted R.Gurr dalam Winardi bahwa,

dalam diri masyarakat telah terjadi deprivasi relatif yakni karena masyarakat lebih mementingkan perut dari pada sekolah dampaknya adalah kurangnya respek terhadap dunia pendidikan yang pada akhirnya kebodohan dan kemiskinan mengiringi kehidupan mereka²⁹.

Kemiskinan menjadi sebuah reproduksi sosial, dimana dari kemiskinan akan melahirkan generasi yang tidak terdidik akibat kurangnya pendidikan kemudian menjadi bodoh serta kemiskinan kembali menjerat.

Menurut Hagul dalam Noor “pendidikan merupakan kunci utama mengentaskan masyarakat dari belitan kemiskinan”³⁰. Hal ini berarti pendidikan memegang peranan vital dalam kehidupan seseorang di masa depan. Pernyataan Hagul juga didukung oleh Todaro menyatakan bahwa “alat satu penyebab kemiskinan suatu bangsa adalah rendahnya pengetahuan mereka”.

Crow dalam Supriyatno mengatakan bahwa, “pendidikan diinterpretasikan dengan makna untuk mempertahankan individu dengan kebutuhan-kebutuhannya”³¹, yang mana kebutuhan-kebutuhan tersebut senantiasa bertambah dan merupakan suatu harapan untuk

²⁹ Winardi, *Ibid* p. 2.

³⁰ Peter Hagul, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Suntingan Noor, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), p. 8.

³¹ Supriyatno, *Perbedaan Tingkat Kecemasan Menghadapi Kecenderungan Impotensi Ditinjau dari Tingkat Pendidikan*, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945, 2001), p. 12.

dapat mengembangkan diri agar berhasil serta untuk memperluas, mengintensifkan ilmu pengetahuan dan memahami elemen-elemen yang ada di sekitarnya. Adam Smith dalam Supriyatno mengakui bahwa,

pendidikan dan latihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja serta meyakini bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu bangsa sangat bergantung pada keunggulan inteligensi dan intelektualitas³².

Indikator pendidikan paling dasar yang sering digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah tingkat kemampuan baca tulis dan rata-rata lamanya sekolah.

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori tingkat pendidikan terakhir menjadi bentuk numerik.

BPS mendefinisikan “Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani”³³. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu

³² *Ibid*, p. 15.

³³ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik sosial*, (Jakarta: BPS-RI, 2010), p. 3.

tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Untuk memperoleh angka rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling* : MYS) dihitung dengan mengolah dua variabel secara simultan, yaitu : tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan (angka diperoleh dari Susenas). Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu. Tahap selanjutnya dihitung rata-rata lama sekolah.

$$MYS = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f}$$

MYS : rata-rata lama sekolah

f : frekuensi penduduk berumur 15 tahun ke atas

x_i : lama sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan yang ditamatkan atau yang pernah diikuti

i : jenjang pendidikan

Tabel II.1

Jenjang Pendidikan Dan Lama Sekolah yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama sekolah

Jenjang Pendidikan	Lama Sekolah (tahun)
Tidak / belum pernah sekolah	0
Belum / tidak tamat SD	1-5
Tamat SD	6
Belum / tidak tamat SLTP	7-8

Tamat SLTP	9
Belum / tidak tamat SLTA	10-11
Tamat SLTA	12
Belum / tidak tamat D3	13-14
Tamat D3	15
Belum / tidak tamat S1	16-18
Tamat S1	19
Tamat S2	21
Tamat S3	24

Catatan : untuk yang belum tamat suatu jenjang pendidikan lama sekolah disesuaikan. Misalnya : seseorang pernah sekolah kelas 2 SD (selesai kelas 2), maka lama sekolah adalah 2 tahun.

Contoh :

Suatu daerah A terdapat 20 penduduk dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

5 orang tamat SD, 3 orang tamat SLTP, 4 orang sampai kelas 4 SD, 8 orang sampai kelas 1 SLTP (kelas VII), maka

$$MYS = \frac{5 \times 6 + 3 \times 9 + 4 \times 3 + 8 \times 7}{20} = 6,25$$

Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 6,25 menggambarkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk pada daerah A dikategorikan setara tingkat Sekolah Dasar (SD) atau tamat SD.

Todaro menyatakan bahwa “pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar”³⁴. Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Simmons dalam Karl E dan Ray C “pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan”³⁵. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka orang tersebut harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, Tingkat Pendidikan adalah urutan pendidikan (proses untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman lebih tinggi) formal mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dengan memperhitungkan tingkat pendidikan yang sedang diduduki dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Dari batasan diatas maka tingkat pendidikan adalah kegiatan individu dalam pembelajaran yang diukur dari rata-rata lama sekolah yakni banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang menjalani pendidikan SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, SLTA selama 3

³⁴ Michael P. Todaro, *Loc. Cit.*, p. 35.

³⁵ Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, suntingan Y. Andri Zaimur (Jakarta: Erlangga, 2007), p. 36.

tahun, DIII selama 3 tahun, S1 selama 4 tahun, S2 selama 2 tahun dan S3 selama 3 tahun terhadap pendidikan yang terakhir ditamatkan yang diambil dari Badan Pusat Statistik.

3. Tingkat Pengangguran

Pengangguran dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Sementara menurut Sri Hermuningsih dikutip dari Deni Tisna, “pengangguran di definisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja (*labor forcé*) untuk memperoleh pekerjaan sesuai yang mereka butuhkan dan mereka inginkan”³⁶.

Menurut BPS pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Konsep pengangguran seperti ini dikenal sebagai pengangguran terbuka.

Ada beberapa organisasi dunia yang berkontribusi menyediakan konsep, definisi, dan data ketenagakerjaan untuk keperluan negara-negara di dunia dalam M. Dawam Rahardjo, antara lain “International Labour Organization (ILO), International Monetary Fund (IMF),

³⁶ Deny Tisna A., *Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesiatahun 2003-2004*, (Semarang: UNDIP, 2008), p. 7.

World Bank (WB), dan Asian Development Bank (ADB)³⁷. Diantara organisasi-organisasi tersebut, ILO yang paling banyak menyediakan konsep dan statistik ketenagakerjaan dunia.

ILO dibentuk untuk membantu penduduk dunia baik perempuan maupun laki-laki untuk memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dalam situasi bebas, adil, aman, dan bermartabat. “ILO didirikan pada tahun 1919 dan kemudian pada tahun 1946 menjadi agen PBB yang bersifat spesialis³⁸. Beberapa konsep ketenagakerjaan disusun oleh ILO dan terangkum dalam Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja atau Key Indicators of the Labour Market (KILM).

Menurut konsep ILO, penganggur terbuka atau dikenal dengan istilah pengangguran didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini mencakup : (1) penduduk yang mencari pekerjaan; (2) penduduk yang mempersiapkan usaha; (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa); dan (4) penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingginya angka pengangguran memiliki sumbangan positif terhadap tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan yang tinggi juga dapat menyumbang tingginya penyimpangan sosial seperti tindak

³⁷ M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit*, p.58.

³⁸ *Ibid.*

kejahatan, pemerkosaan, prostitusi, narkoba, gelandangan dan pengemis (gepeng).

Pengangguran di mata pemerintah, jelas bahwa negara dalam hal ini penyelenggara pemerintahan berkewajiban menyediakan pekerjaan. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2): “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini lebih dipertegas lagi melalui bunyi pasal 28 ayat (2) bahwa: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pengangguran sebenarnya tidak perlu ada jika pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja yang layak, adil, dan manusiawi seperti yang diamanatkan oleh konstitusi.

Dari sisi pendidikan, tingkat pengangguran selama periode 1980 – 1990 pada beberapa tingkat pendidikan memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Tingkat angkatan kerja berpendidikan di bawah Sekolah Dasar yang menganggur paling rendah sedangkan yang berpendidikan tinggi adalah yang paling tinggi, yaitu meningkat dari 1,8 persen pada 1980 menjadi 15,9 persen pada 1990.

Menurut Marshal “bahwa suatu bangsa tidak mungkin memiliki tenaga kerja bertaraf internasional jika seperempat dari pelajarnya gagal dalam menyelesaikan pendidikan menengah”³⁹.

³⁹ Deny Tisna A, *Ibid*, p. 12.

Menurut BPS, jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2009 yang lalu mencapai 9,2 juta orang atau 8,14% dari total penduduk Indonesia. Jumlah pengangguran tersebut jika diurai menurut pendidikan dan jenis kelamin sangatlah fantastis. Dari 9,2 penganggur di Indonesia tahun 2009, ternyata 5 juta orang penganggur berjenis kelamin pria dan 4,2 juta orang sisanya wanita. Jumlah pengangguran yang besar tersebut masih akan bertambah terus seiring dengan banyaknya lulusan baru, adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kemungkinan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari luar negeri.

Menurut Edgar O. Edwards dalam Tulus Tambunan pengangguran dapat golongkan menjadi tiga jenis, yakni⁴⁰ :

- a). Pengangguran terbuka (*open unemployment*), yang terbagi lagi menjadi dua: 1). Penganggur sukarela, merupakan kelompok angkatan kerja yang memilih tidak bekerja karena tidak bersedia digaji pada jumlah tertentu maupun mengharapkan pekerjaan yang lebih baik. 2). Penganggur terpaksa, merupakan kelompok angkatan kerja yang bersedia bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan.
- b). Setengah penganggur (*underemployment*), yaitu kelompok kerja yang lamanya bekerja (dalam satuan jam, hari, ataupun minggu) kurang dari yang seharusnya mereka bisa kerjakan. Contoh: orang

⁴⁰ Tulus H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1997), p. 25.

yang sudah memiliki pekerjaan tetapi malas-malasan, datang terlambat, atau pulang lebih cepat.

c). Bekerja tidak secara penuh, yang terbagi lagi menjadi lima masing-masing:

1). Pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*), contoh :

petani yang bekerja di sawah selama sehari penuh, dilihat dari jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan di sawah semestinya pekerjaan tersebut tidak perlu dilakukan sehari penuh tetapi cukup setengah hari saja.

2). Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*), orang yang

bekerja tetapi tidak sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikannya sehingga orang tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal.

3). Pensiun awal, seseorang yang pensiun awal memiliki tujuan

tertentu seperti untuk memberi kesempatan tenaga kerja baru yang memiliki pemikiran yang lebih aplikatif dan untuk mengurangi tenaga kerja tua yang produktivitasnya mulai menurun.

4). Tenaga kerja lemah (*impaired*), kelompok ini memiliki

pekerjaan dan bekerja secara penuh tetapi intensitasnya rendah. Kelompok pengangguran ini lebih dikarenakan kurang gizi atau menderita penyakit tertentu.

5). Tenaga kerja tidak produktif, kelompok ini sebenarnya sudah memiliki pekerjaan dan mampu bekerja secara produktif tetapi karena kurangnya fasilitas yang dimiliki perusahaan mengakibatkan mereka menghasilkan pekerjaan yang kurang memuaskan.

Pendapat lainnya, Payaman J. Simanjuntak dalam Deny Tisna mengatakan bahwa “pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan”⁴¹.

Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa jenis dikutip dari Dhony, yaitu⁴² :

- 1) Pengangguran konjungtural (Cycle Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.
- 2) Pengangguran struktural (Struktural Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti : akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan penggunaan teknologi, akibat kebijakan pemerintah.
- 3) Pengangguran friksional (Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara

⁴¹ Deny Tisna, *Op. Cit*, p. 18..

⁴² Dhony, *Pengangguran dan Kemiskinan Di Indonesia* (Pontianak: Fisip Untan, 2011), p. 5.

pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.

- 4) Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.
- 5) Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.
- 6) Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (*aggrerat demand*).

Menurut Tambunan dikutip dari Dian Octaviani, pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain⁴³:

- 1) Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.
- 2) Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan

⁴³Dian Octaviani, *Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan*, *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 9, No.3, Desember 2003. pp. 219-238.

peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Lincolind Arsyad dikutip dari Ravi Dwi Wijayanto, menyatakan bahwa ada pengaruh yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. “Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin”⁴⁴. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya.

Menurut Sadono Sukirno, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

⁴⁴ Ravi Dwi Wijayanto, *Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan: Latar Belakang Teoretis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), p. 54.

Ada juga pekerja diparkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya dengan banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

Sesuai dengan keputusan Konvensi ILO (International Labor Organization) No. 138 pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-58 tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa dalam Direktorat Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan bahwa,

batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun. Namun, untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun⁴⁵.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Konvensi, Indonesia sebagai anggota PBB dan anggota ILO menetapkan bahwa batas usia minimum seseorang diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.

⁴⁵ Direktorat Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan, *Laporan Sosial Indonesia 2007* (Jakarta: BPS-RI, 2007), p. 10.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPT} = (\text{Penganggur} / \text{Angkatan Kerja}) \times 100 \%$$

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia selain angka kemiskinan. Indikator TPT selalu diumumkan setiap tahun pada Pidato Presiden tanggal 16 Agustus sebagai bukti kinerja Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan uraian definisi di atas, pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya, meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dari batasan di atas, pengangguran ialah angkatan kerja produktif dengan batasan usia 15 tahun keatas yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja yang diambil dari BadanPusat Statistik.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan telah dilakukan sebelumnya oleh sejumlah peneliti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani tahun 2001 dengan judul “Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri yang dikemukakan oleh Cutler dan Katz, yaitu :

$$P_t = \beta_0 + \beta_1 (P/Y)_T + \beta_2 \rho_T + \beta_3 \mu_t + \beta_4 G_t + \epsilon_t$$

Dimana:

P_t = tingkat kemiskinan agregat pada tahun ke t diukur dengan indeks

FGT

$(P/Y)_t$ = rasio garis kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata

ρ_T = tingkat inflasi

G_t = rasio gini

μ_t = tingkat pengangguran

ϵ_t = *error term*

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya tahun 2008 dengan judul “Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004”. Analisis yang dilakukan adalah analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Marius Masri Sadipun tahun 2011 dengan judul “Analisis Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia”. Dengan menggunakan analisis data panel dan menunjukkan hasil dari variabel pengangguran

berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Profan Ali Azmi tahun 2009 dengan judul penelitiannya “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2007”, memberikan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.
5. Penelitian yang juga dilakukan oleh Ravi Dwi Wijayanto dalam “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Jawa Tengah”, menghasilkan variabel pendidikan (melek huruf) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Jawa Tengah, dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Jawa Tengah.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan

Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang, menitikberatkan pada keterkaitan antara pendidikan dengan kemiskinan.

Terdapat korelasi positif antara pendidikan dengan penghasilannya seumur hidup. Tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh tingkat

pendidikan, para pelajar dari keluarga yang berpenghasilan tinggi jauh lebih besar peluangnya untuk meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Anak dari keluarga miskin dalam prakteknya sangat sulit untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga pekerjaan dan upah yang didapat sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkannya.

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat besar akan berpengaruh terhadap kondisi sosial manusia Indonesia. Permasalahan dan tantangan pembangunan nasional lima tahun ke depan masih diprioritaskan pada masalah sosial yang mendasar, antara lain besarnya angka kemiskinan dan pengangguran.

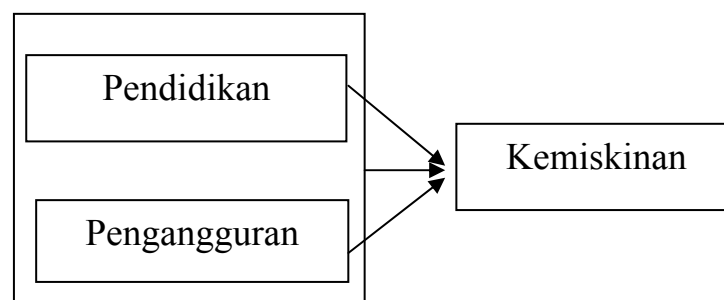
Salah satu akibat yang nyata dari terjadinya krisis moneter adalah meningkatnya jumlah pengangguran akibat banyaknya industri yang bangkrut sehingga tenaga kerja harus dirumahkan. Selain adanya pemutusan kerja, pengangguran juga bertambah karena adanya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahun. Secara logika jurang (gap) kemiskinan yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dengan kelompok miskin, berarti semakin luas dan sebaliknya.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Didasarkan pada adanya lingkaran setan (lingkaran kemiskinan), yang mana kemiskinan tidak hanya semata dipengaruhi oleh tingkat

pendidikan saja. Minimnya pendapatan yang dimiliki memaksa seseorang untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga pekerjaan yang didapat pun tidak sesuai atau bahkan tidak mampu bersaing di dunia kerja sehingga mengalami pengangguran yang jika dalam jangka panjang akan mengakibatkan keterpurukan ekonomi sehingga berada dalam kemiskinan. Keadaan miskin yang dialami berakibat pula pada ketidakmampuan untuk melakukan saving ataupun investasi, begitulah seterusnya keadaan lingkaran kemiskinan.

Sehingga penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaruh antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia.



Gambar II.1

Desain Penelitian

D. Perumusan Hipotesis

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoretis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang negatif tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Terdapat pengaruh yang positif tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.
3. Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang sah, benar dan dapat dipercaya (dapat diandalkan atau reliable), tentang :

- a. Pengaruh antara tingkat pendidikan (variabel bebas) terhadap kemiskinan (variabel terikat) penduduk di Indonesia tahun 2006-2010.
- b. Pengaruh antara tingkat pengangguran (variabel bebas) terhadap kemiskinan (variabel terikat) penduduk di Indonesia tahun 2006-2010.
- c. Pengaruh antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia tahun 2006-2010.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia karena wilayah ini ditemukan fenomena tentang masalah kemiskinan, juga agar peneliti lebih mengetahui keadaan sosial di Indonesia karena merupakan tempat tinggal peneliti.

Waktu penelitian dilaksanakan 1 bulan pada bulan April 2012 dengan alasan pada waktu itu paling luas untuk melakukan penelitian karena waktu tersebut dianggap lebih efektif, sehingga peneliti dapat lebih memfokuskan diri pada pelaksanaan penelitian.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Ekspos Facto* yaitu usaha penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas dengan menggunakan data yang sudah terjadi. Metode ini digunakan dengan alasan karena menggunakan data yang tersedia dengan menggunakan pendekatan korelasi sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran dengan kemiskinan penduduk di Indonesia.

Analisis data panel adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (*time series*) dengan data antar individu/daerah (*cross section*) dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007, SPSS dan Eviews6. Kegiatan pengolahan data dengan menggunakan *Microsoft Excel 2007* mencakup pembuatan tabel dan grafik untuk kepentingan analisis; Pengolahan data dengan *SPSS* untuk mendeteksi apakah terdapat gangguan multikolinietas yang terjadi pada variabel yang masuk ke dalam model regresi data panel terbaik dan pengujian asumsi normalitas; *Eviews6* dilakukan untuk mengestimasi parameter-parameter model regresi dan statistik-statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat serta uji-uji formal menyangkut pemilihan metode estimasi serta spesifikasi model terbaik.

Dengan menggunakan analisis data panel untuk mengetahui pengaruh antara variabel tingkat pendidikan (PD) dan variabel tingkat pengangguran

(PG) terhadap variabel kemiskinan (MS), model yang akan digunakan untuk mengetahui kemiskinan di Indonesia yaitu :

$$MS = f (PD, PG) \quad (3.1)$$

$$MS = \beta_0 + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 PG_{it} + E_{it} \quad (3.2)$$

Dimana :

MS = variabel kemiskinan.

PD = variabel tingkat pendidikan.

PG = Variabel tingkat pengangguran.

i = *cross section*.

t = *time series*.

β_0 = konstanta.

β_1, β_2 = koefisien.

E = *error*.

D. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi mengambil dari Badan Pusat Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2006-2010 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 33 propinsi di Indonesia yang menghasilkan 165 observasi. Data yang diperlukan adalah:

1. Data persentase penduduk miskin untuk masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2006 - 2010.

2. Data rata-rata lama sekolah sebagai proxy tingkat pendidikan untuk masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2006-2010.
3. Data tingkat pengangguran terbuka sebagai proxy tingkat pengangguran untuk masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2006-2010.

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta dari browsing website internet yang terkait dengan masalah kemiskinan.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Tingkat Pendidikan (X_1)

a. Definisi Konseptual

Tingkat Pendidikan adalah urutan pendidikan (proses untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman lebih tinggi) formal mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dengan memperhitungkan tingkat pendidikan yang sedang diduduki dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

b. Definisi Operasional

Tingkat Pendidikan adalah kegiatan individu dalam pembelajaran yang diukur dari rata-rata lama sekolah yakni perbandingan banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang menjalani pendidikan terhadap pendidikan yang terakhir ditamatkan

SD selama 6 tahun, SLTP selama 3 tahun, SLTA selama 3 tahun, DIII selama 3 tahun, S1 selama 4 tahun, S2 selama 2 tahun dan S3 selama 3 tahun yang diambil dari Badan Pusat Statistik.

2. Tingkat Pengangguran (X_2)

a. Definisi Konseptual

pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya, meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b. Definisi Operasional

Pengangguran ialah angkatan kerja produktif dengan batasan usia 15 tahun keatas yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja yang diambil dari Badan Pusat Statistik.

3. Kemiskinan (Y)

a. Definisi Konseptual

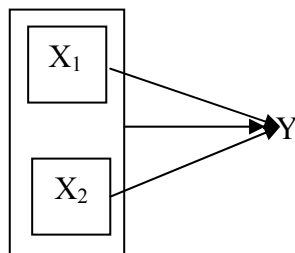
Kemiskinan adalah sebuah kondisi yang berada di bawah nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*) dari kebutuhan yang bersifat materil.

b. Definisi Operasional

Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami berbagai kekurangan (ketidakberdayaan) yakni dengan memiliki pendapatan dibawah Rp 7.000 per hari untuk memperoleh makanan dengan kandungan kalori kurang dari 2.100 per harinya.

F. Konstelasi Hubungan Antar Variabel

Konstelasi hubungan antar variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah atau gambaran dari penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

X₁ : Tingkat Pendidikan (variabel bebas 1)

X₂ : Tingkat Pengangguran (variabel bebas 2)

Y : Kemiskinan (variabel terikat)

G. Teknik Analisis Data

1. Metode Analisis

a. Analisis Data Panel

Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). Gujarati menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \quad (3.3)$$

dimana N adalah banyaknya data *cross-section*

Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \quad (3.4)$$

dimana T adalah banyaknya *data time-series*

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it} \quad (3.5)$$

$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$

dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$ = banyaknya data panel

Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut *balanced panel*. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut *unbalanced panel*. Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada data panel yang bersifat *balanced panel* dan jumlah unit individu lebih banyak dibandingkan jumlah unit waktu ($N > T$). Penggunaan data panel pada dasarnya merupakan solusi akan ketidakterersediaan data *time-series* yang cukup panjang untuk kepentingan analisis ekonometrika.

Menurut Hsiao dalam Greene keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah:

- a) Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degrees of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.
- b) Dengan panel data, data lebih informatif, lebih bervariasi, yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* dan *time series* saja.
- c) Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

b. Estimasi Model

Dalam mengestimasi model regresi data panel terdapat tiga spesifikasi model yang mungkin digunakan, yakni model *common effects*, *fixed effect*, dan *random effect*.

1) Model *Common Effect*

Model *common effects* atau *pooled regression* merupakan model regresi data panel yang paling sederhana. Model ini pada dasarnya mengabaikan struktur panel dari data, sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu atau dengan kata lain pengaruh spesifik dari masing-masing individu diabaikan atau dianggap tidak ada. Dengan demikian, akan dihasilkan sebuah persamaan regresi yang sama untuk setiap unit *cross-section*. Sesuatu yang secara realistis tentunya kurang dapat diterima. Karena itu, model ini sangat jarang digunakan dalam analisis data panel.

2) Model *Fixed Effect*

Jika model *common effect* cenderung mengabaikan struktur panel dari data dan pengaruh spesifik masing-masing individu, maka model *fixed effect* adalah sebaliknya. Pada model ini, terdapat efek spesifik individu α_i dan diasumsikan berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati X_{it} .

Ekananda menyatakan bahwa berdasarkan asumsi struktur matriks varians-kovarians residual, maka pada model *fixed effect*, terdapat 3 metode estimasi yang dapat digunakan, yaitu:

- a) *Ordinary Least Square (OLS/LSDV)*, jika struktur matriks Varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat homoskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*,
- b) *Weighted Least Square (WLS)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*,
- c) *Seemingly Uncorrelated Regression (SUR)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation*.

3) Model Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*).

Pendekatan ini mengasumsikan *unobservable* individual *effects* (u_{it}) tidak berkorelasi dengan *regressor* (X) atau dengan kata lain u_{it} diasumsikan bersifat random. Sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi apakah *fixed effect* atau *random effect* atau keduanya memberikan hasil yang sama.

c. Penyeleksian Model Estimasi Data Panel

1) Pengujian Signifikansi *Common Effects* atau *Fixed Effects*

Signifikasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan uji statistik F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik

regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel *dummy* (*common effect*) dengan melihat *residual sum squares* (*RSS*).

$$F = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/(n-1)}{RSS_2 / (nT - n - k)} \quad (3.6)$$

Di mana, n adalah jumlah individu, T adalah periode waktu, k adalah parameter dalam model *fixed effect*, RSS_1 dan RSS_2 masing-masing merupakan *residual sum of squares* teknik tanpa variabel *dummy* dan teknik *fixed effect* dengan variabel *dummy*. Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat bebas sebanyak $(n-1)$ untuk numerator dan $(nT - n - k)$ untuk *denominator*. Jika nilai statistik F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis nul akan ditolak, yang berarti koefisien intersep dan slope adalah sama tidak berlaku, sehingga teknik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari *common effect*.

2) Pengujian Signifikansi *Common Effects* atau *Random Effects*

Breush dan Pagan telah mengembangkan pengujian *Lagrange Multiplier* untuk mengetahui signifikansi dari *random effects* berdasarkan residual dari OLS (*common effects*). Secara matematis, statistik uji untuk *LM test* (*Lagrange Multiplier*) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T e_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2 = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n [T \bar{e}_i]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2 \quad (3.7)$$

Di bawah hipotesis nul, LM mengikuti sebaran *chi-square* dengan derajat bebas satu. Jika hasil LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-square*, maka hipotesis nul akan ditolak, yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah metode *random effect* dibandingkan metode *common effects*.

3) Pengujian Signifikansi Fixed Effects atau Random Effects

Setelah menguji signifikansi antara *common effects* atau *fixed effects* serta *common effects* atau *random effects*, maka selanjutnya jika terbukti *fixed effects* dan *random effects* sama-sama lebih baik dari *common effects* adalah melakukan pengujian signifikansi *fixed effects* atau *random effects*.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan β_{FE} dan β_{RE} untuk *subset* dari koefisien variabel-variabel yang bervariasi antar unit waktu (*time-varying variables*). Secara matematis dengan menggunakan notasi matriks, statistik uji Hausman (H) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$H = \left(\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE} \right)' \left[\text{var} \left(\hat{\beta}_{FE} \right) - \text{var} \left(\hat{\beta}_{RE} \right) \right]^{-1} \left(\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE} \right) \quad (3.8)$$

Di bawah hipotesis nul, statistik uji ini mengikuti sebaran *chi-square* dengan derajat bebas M , di mana M adalah jumlah variabel penjelas yang nilainya bervariasi antar unit waktu di dalam model.

Hipotesis nul pada uji Hausman adalah efek spesifik individu tidak berkorelasi dengan peregresi atau dengan kata lain model *random effect* lebih baik bila dibandingkan dengan model *fixed effect*. Di bawah hipotesis nul, pendugaan parameter dengan menggunakan *random effect* adalah konsisten dan efisien, sedangkan pendugaan dengan *fixed effect* meskipun tetap konsisten, tetapi tidak lagi efisien. Di bawah hipotesis alternatif, estimasi dengan *random effect* menjadi tidak konsisten, sebaliknya estimasi dengan *fixed effect* tetap konsisten. Jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-square*, maka hipotesis nul akan ditolak, yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah metode *fixed effect* dari pada metode *random effect*.

Gujarati memberikan sejumlah pertimbangan terkait pilihan apakah menggunakan model *fixed effect* (FE) ataukah model *random effect* (RE). Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut:

1. Jika jumlah data *time series* (T) besar dan jumlah data *cross-section* (N) kecil, ada kemungkinan perbedaan nilai parameter yang diestimasi dengan FE dan RE cukup kecil. Karena itu, pilhan ditentukan berdasarkan kemudahan perhitungan. Dalam hal ini, adalah model FE.

2. Ketika N besar dan T kecil estimasi kedua metode dapat berbeda secara signifikan. Pada kondisi seperti ini, pilihan ditentukan berdasarkan keyakinan apakah individu yang diobservasi merupakan sampel acak yang diambil dari populasi tertentu atau tidak. Jika observasi bukan merupakan sampel acak, maka digunakan model FE. Jika sebaliknya, maka digunakan model RE.
3. Jika efek individu tidak teramati α_i berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas, maka estimasi dengan RE bias, sedangkan estimasi dengan FE tidak bias.
4. Jika N besar dan T kecil, serta semua asumsi yang disyaratkan oleh model RE terpenuhi, maka estimasi dengan menggunakan RE lebih efisien dibanding estimasi dengan FE.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Menurut Greene “uji asumsi klasik perlu dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien”⁴⁶. Konsekuensi yang muncul ketika membangun model regresi dengan data panel adalah bertambahnya komponen residual, karena adanya dimensi *cross-section* dan *time-series* pada

⁴⁶ William H. Greene, *Econometric Analysis* (New York : New York University, 2002), p. 307.

data. Kondisi ini menyebabkan matriks varian kovarian residual menjadi sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan model regresi klasik yang hanya menggunakan data *cross section* atau data *time series*.

Pada model regresi klasik, pelanggaran terhadap asumsi klasik terkait residual, seperti heterokedastisitas dan autokorelasi merupakan masalah serius yang mengakibatkan penduga parameter regresi yang diestimasi dengan OLS tidak lagi bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*). Tindakan yang biasa dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan penghitungan *robust standard error*.

Terdapat beberapa kemungkinan struktur varian kovarian residual yang mungkin terjadi pada model regresi data panel. Berbagai kemungkinan yang dibahas pada bagian ini adalah yang biasa dijumpai pada estimasi model dengan *common effects* dan *fixed effect*. Karena itu, metode-metode estimasi yang dapat digunakan terkait struktur varian kovarian residual yang dipaparkan pada bagian ini hanya akan diterapkan pada model yang diestimasi dengan *common effects* atau *fixed effect*.

a. Uji Heterokedastisitas (*Lagrange Multiplier*)

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadi kesamaan varian residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi

Pada pengujian ini, hipotesis nul (H_0) yang digunakan adalah bahwa struktur varians-covarians residual bersifat homoskedastik. Sementara hipotesis alternatif (H_1) adalah bahwa struktur varians-covarians residual bersifat heteroskedastik.

Secara matematis, statistik uji yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$LM = \frac{T}{2} \sum_{i=1}^n \left[\frac{\hat{\sigma}_i^2}{\hat{\sigma}^2} - 1 \right]^2 \quad (3.9)$$

di mana T adalah jumlah periode waktu, n adalah jumlah individu, adalah varians residual persamaan ke- i pada kondisi homoskedastik, dan adalah *Sum Square Residual (SSR)* persamaan *system* pada kondisi homoskedastik.

Statistik uji LM ini mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan derajat bebas sebanyak $n-1$. Jika nilai statistik LM lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-square*, maka hipotesis nul ditolak, yang berarti struktur varians-covarians residual bersifat heteroskedastik.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antar residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

Pengujian ini dilakukan apabila hasil pengujian LM pada poin (2.1) menunjukkan bahwa struktur varians-covarians residual bersifat heteroskedastik. Pada pengujian ini, hipotesis nul (H_0) yang digunakan adalah bahwa struktur varians-covarians residual bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*. Sementara hipotesis alternatifnya (H_1) adalah bahwa struktur varians-covarians residual bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation* (*Seemingly Uncorrelated Regression/SUR*). Secara matematis, statistik uji yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\lambda LM = T \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} r_{ij}^2 \quad (3.10)$$

di mana T adalah jumlah periode waktu, n adalah jumlah individu, dan r_{ij} adalah *residual correlation coefficient* antara persamaan ke- i dan ke- j .

Statistik uji LM ini mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan derajat bebas sebanyak $n(n-1)/2$. Jika nilai statistik LM lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-square*, maka hipotesis nul akan ditolak, yang berarti struktur varians-covarians residual bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation* (*Seemingly Uncorrelated Regression/SUR*).

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidak gangguan (μ) antara lain J-B test dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung skweness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai X^2 (Chi Square) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal. Model untuk mengetahui uji normalitas adalah:

$$JB = n \left[\frac{\mu_3^2}{6\mu_2^3} + \frac{(\frac{\mu_4}{\mu_2} - 3)^2}{24} \right] \quad (3.10)$$

di mana:

n = jumlah sampel

2 = varians

3 = skewness

4 = kurtosis

Jarque-Bera test mempunyai distribusi *chi square* dengan derajat bebas dua. Jika hasil *Jarque-Bera test* lebih besar dari nilai *chi square* pada $\alpha=5$ persen, maka tolak hipotesis nul yang berarti tidak berdistribusi normal. Jika hasil *Jarque- Bera test* lebih kecil dari nilai *chi square* pada $\alpha=5$ persen, maka terima hipotesis nul yang berarti *error term* berdistribusi normal.

d. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya korelasi antar variabel bebas, yang terjadi karena variabel-variabel bebas tersebut memiliki hubungan pada populasi atau hanya pada sampel. Cara mendeteksi adanya multikolinieritas :

1. Dengan memeriksa *simple pairwise* (Pearson) *correlation* antar variabel independen. Batas nilai yang disarankan sebagai indikasi kolinieritas serius berbeda-beda (0,8 menurut Berry dan Felman, 1985; dan 0,9 menurut Griffith dan Amerhein, 1997). Nash dan Bradford menyebutkan bahwa suatu variabel independen berkorelasi tinggi dengan variabel independen lainnya jika r lebih dari 0,85.

2. Uji formal untuk mendeteksi keberadaan dari multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF ini menunjukkan bagaimana varians dari sebuah estimator akan meningkat akibat adanya multikolinieritas. Nilai VIF diperoleh dengan formula berikut:

$$VIF_k = \frac{1}{1-R_k^2} \quad (3.11)$$

dimana $k = 1, 2, \dots, p - 1$ dan R_k^2 merupakan koefisien determinasi dari regresi berganda ketika X_k diregresikan dengan $p-2$ variabel lainnya dalam model. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka hal tersebut dapat berindikasi bahwa multikolinieritas bersifat serius dan akan memengaruhi estimasi yang menggunakan OLS

karena meskipun estimator tetap bersifat *unbiased* namun sudah tidak lagi memiliki varians yang minimum. Selain itu, keberadaan multikolinieritas juga akan membuat estimator bersifat sensitif untuk perubahan yang kecil pada data, sehingga akan mengakibatkan kesalahan (*misleading*) dalam menginterpretasikan suatu model regresi. Cara mengatasi adanya multikolinieritas antara lain melepas satu atau lebih variabel yang memiliki korelasi yang tinggi, mentransformasi model, atau memperbesar jumlah sampel.

3. Pengujian Kriteria Statistik

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan:

1. $H_0 : b_1, b_2 = 0$ semua variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.
2. $H_1 : b_1, b_2 \neq 0$ semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (n + k - 1)}{1 - R^2 / (nT - n - k)} \quad (3.12)$$

dimana:

k = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- a) H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila F hitung $<$ F tabel, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
- b) H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila F hitung $>$ F tabel, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebasnya. Hipotesis pengujian:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus:

$$T_{hitung} = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)} \quad (3.13)$$

β_i adalah nilai penduga parameter ke- i , $se(\beta_i)$ adalah simpangan baku dari nilai penduga parameter ke- i .

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b) Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R-squared)

R^2 digunakan untuk mengukur kebaikan atau kesesuaian suatu model persamaan regresi. Besaran R^2 dihitung dengan rumus:

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2} = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS} \quad (3.13)$$

Dan R^2 *adjusted* dihitung dengan rumus:

$$\overline{R^2} = 1 - (1 - R^2) \frac{nT - 1}{nT - n - k} \quad (3.14)$$

ESS: Jumlah kuadrat yang dijelaskan

RSS: Jumlah kuadrat residual.

TSS: Jumlah kuadrat total.

n: Jumlah observasi (negara)

T: Jumlah periode waktu.

k: Banyaknya variabel bebas tanpa intersep.

Adjusted R² digunakan karena sudah menghilangkan pengaruh penambahan variabel bebas dalam model, karena nilai R^2 akan terus naik seiring dengan penambahan variabel bebas. Karena itu

kita harus berhati-hati dalam menggunakan nilai R^2 ketika menilai kebaikan dan kesesuaian suatu model persamaan regresi. Penggunaan *adjusted* R^2 sudah memperhitungkan jumlah derajat bebas.

BAB IV

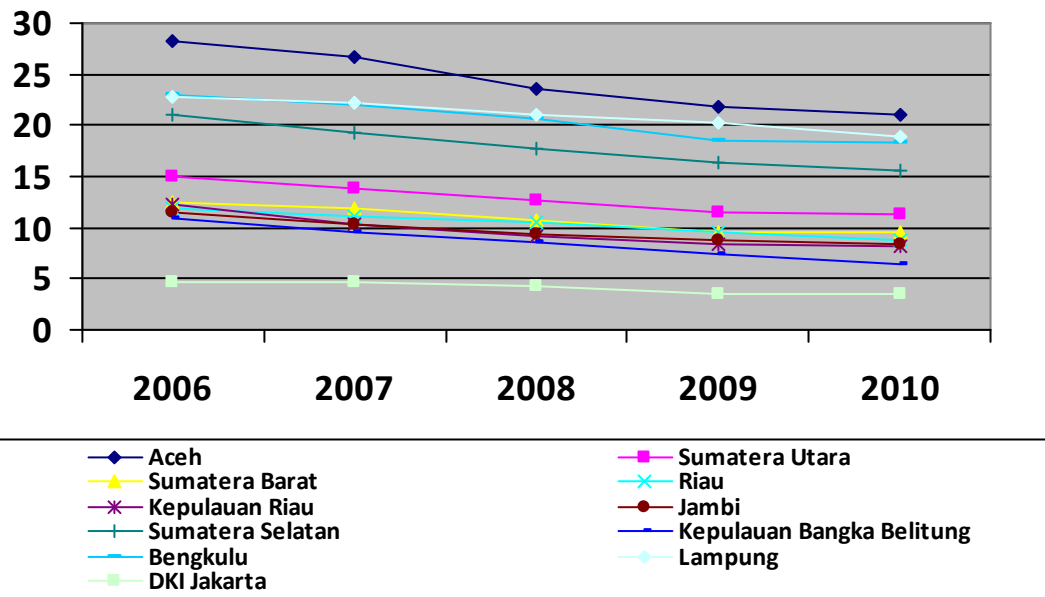
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskriptif data penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran atau distribusi data. Terdapat tiga variabel yaitu kemiskinan adalah variabel Y, tingkat pendidikan adalah variabel X_1 , dan pengangguran adalah variabel X_2 . Diperoleh seperangkat data yang dapat dideskripsikan dengan menggunakan statistik deskripsi.

1. Kemiskinan

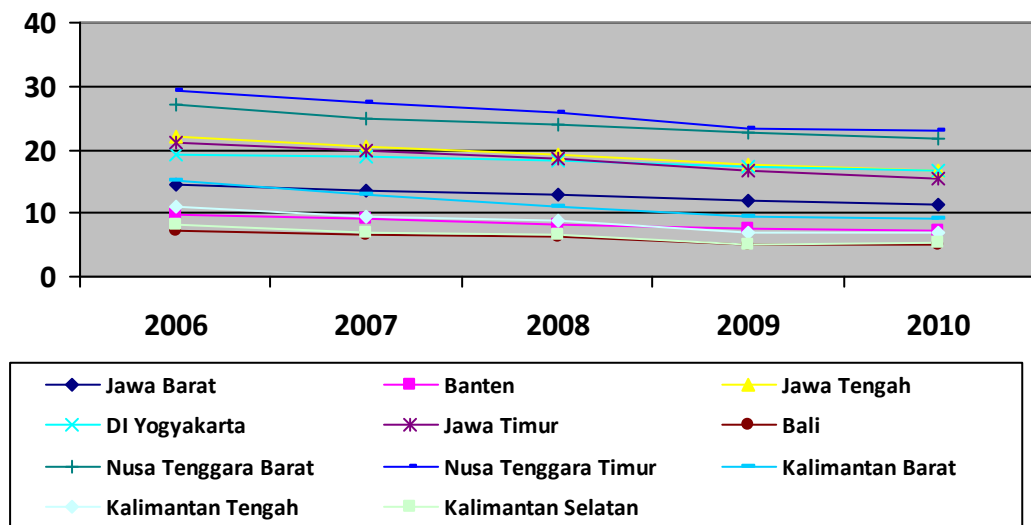
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara lain : tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesehatan, pendidikan dan lingkungan, serta banyak lagi faktor lainnya. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya tujuan masyarakat adil dan makmur. Kemiskinan juga dianggap sebagai penyakit yang muncul saat masyarakat mempunyai kekurangan material maupun non material. Sebab itu, pemerintah sangat berupaya keras untuk mengatasi permasalahan kemiskinan sehingga pembangunan dilakukan secara terus menerus termasuk dalam menentukan batas ukur kemiskinan.



Sumber : Data diolah

Gambar IV.1.1
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006-2010

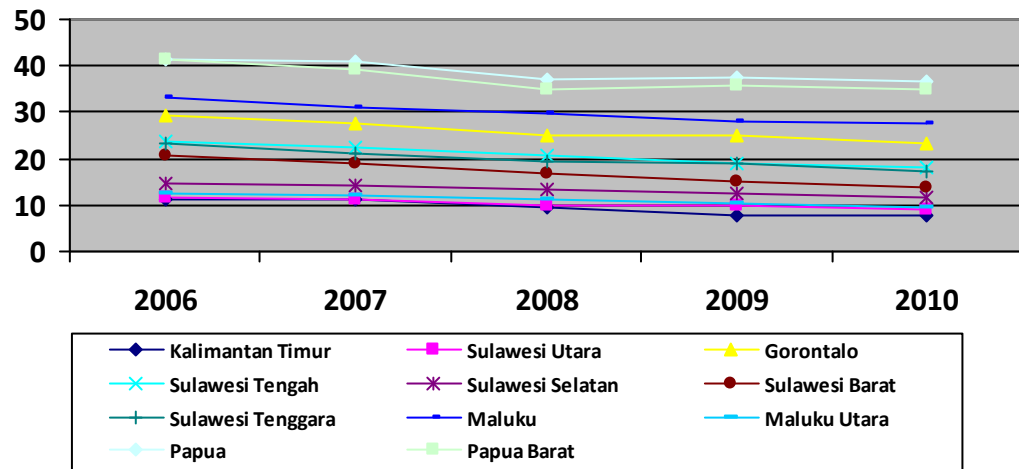
Keadaan kemiskinan yang digambarkan dari gambar IV.1.1 bahwa hampir semua propinsi mengalami penurunan persentase kemiskinan. Kemiskinan pada propinsi Sumatera Barat tahun 2010 tidak mengalami perubahan yakni tetap berada pada angka 9.5 %. Persentase penduduk miskin tertinggi berada pada propinsi Aceh sampai dengan akhir 2010 sebesar 21%. Sedangkan Ibu kota Jakarta memiliki persentase penduduk miskin terendah yakni sebesar 3.5% di akhir tahun 2010.



Sumber : Data diolah

Gambar IV.1.2
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006-2010

Keadaan kemiskinan yang terjadi pada propinsi yang ada dalam gambar IV.1.2 mencerminkan bahwa tidak semua propinsi mengalami penurunan kemiskinan pada tiap tahunnya. Kemiskinan propinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan pada tahun 2009-2010 sebesar 0.1%. Propinsi Banten yang merupakan propinsi baru pun keadaan kemiskinannya cenderung menurun, penurunannya berkisar 0.4% sampai 0.9% per tahun.



Sumber : Data Diolah

Gambar IV.1.3
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006-2010

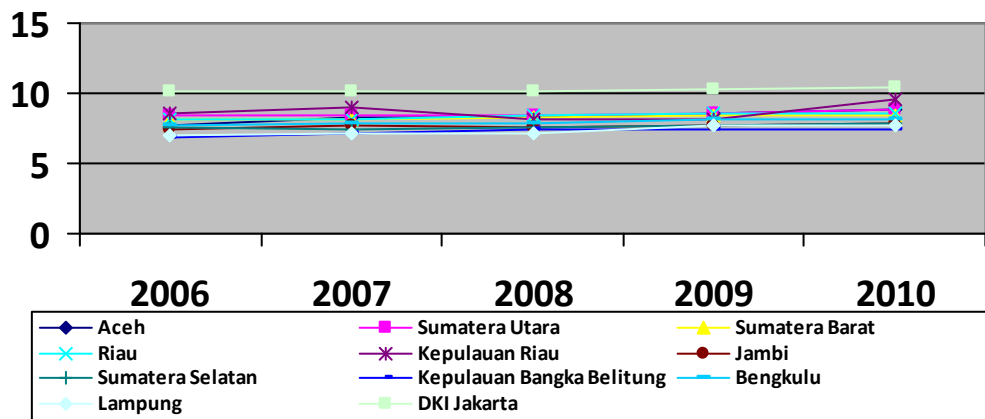
Kemiskinan sebelas propinsi yang digambarkan pada gambar IV.1.3 menunjukkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin tidak dialami oleh semua propinsi. Propinsi Kalimantan Timur tahun 2010 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya atau tetap berada pada kemiskinan sebesar 7.7%. Berbeda dengan propinsi Kalimantan Timur, persentase penduduk miskin pada propinsi Gorontalo, Papua dan Papua Barat justru mengalami peningkatan persentase penduduk miskin. Peningkatan persentase penduduk miskin tersebut sama-sama berada pada tahun 2009. Propinsi Gorontalo mengalami peningkatan sebesar 0.1% pada tahun 2009 dari tahun sebelumnya. Propinsi Papua mengalami peningkatan persentase sebesar 0.4% pada tahun 2009. Persentase peningkatan penduduk miskin tertinggi dialami oleh propinsi Papua Barat pada tahun 2009

sebesar 0.6 % dibandingkan dengan tahun 2008 yang persentase kemiskinannya sebesar 35.1%.

Gambar IV.1 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2006 - 2010 terbanyak yakni berada di propinsi Papua dengan tingkat kemiskinan 41,5 persen pada tahun 2006 dan mengalami penurunan menjadi 36,8 persen di tahun 2010, serta sebelumnya mengalami penurunan yang fluktuasi di tahun 2008 sampai dengan 2009. Propinsi yang memiliki persentase penduduk miskin paling sedikit adalah propinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 3,5 persen di akhir tahun 2010.

2. Tingkat Pendidikan

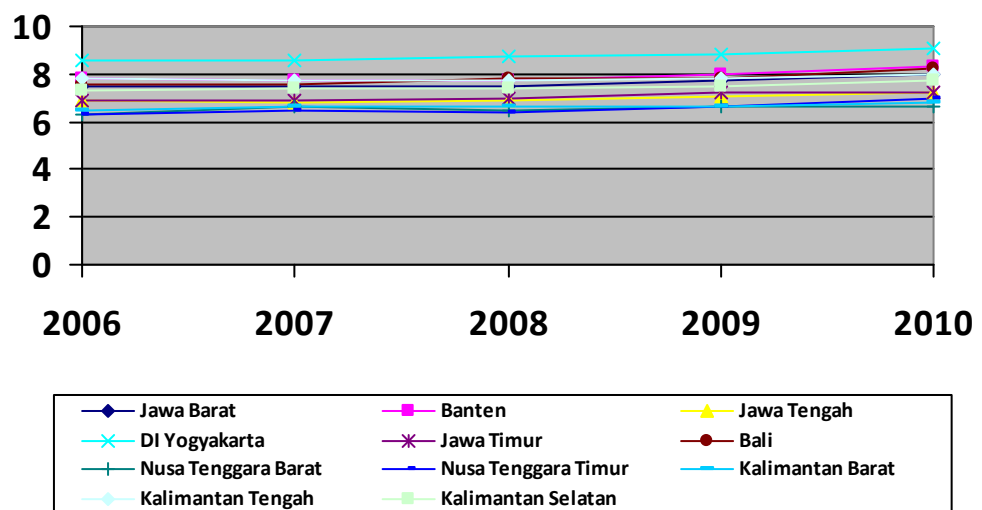
Untuk memutus rantai sebab akibat, ada satu unsur kunci yaitu pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan. Salah satu indikator pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk di Indonesia. Berikut data rata-rata lama sekolah di Indonesia.



Sumber : Data Diolah

Gambar IV.2.1
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2006-2010

Rata-rata lama sekolah yang digambarkan dalam gambar IV.2.1 dari sebelas propinsi tidak banyak yang mengalami perubahan yang berarti. Rata-rata lama sekolah yang dijalani penduduk mengalami fluktuasi seperti yang terjadi pada propinsi Kepulauan Riau, Jambi dan Sumatera Selatan yang terjadi antara tahun 2006-2008.

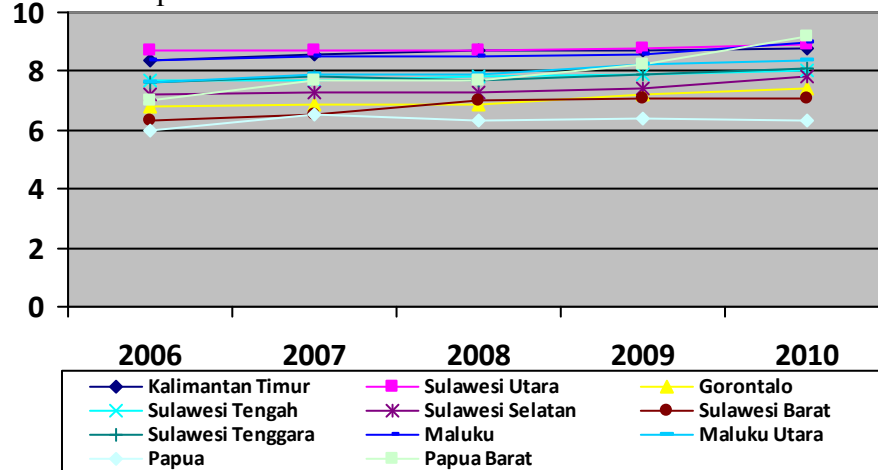


Sumber : Data diolah

Gambar IV.2.2
Persentase Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2006-2010

Rata-rata lama sekolah penduduk di masing-masing propinsi yang digambarkan pada gambar IV.2.2 juga mengalami fluktuasi. Propinsi

Banten yang merupakan propinsi tidak mengalami peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun 2007-2008 sebesar 7.7 tahun. Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sama-sama mengalami penurunan rata-rata lama sekolah pada tahun 2007. Gambar IV.2.2 juga menggambarkan kondisi rata-rata lama sekolah penduduk yang peningkatannya cukup baik, propinsi DI Yogyakarta bahkan memiliki rata-rata lama sekolah penduduk yang cukup baik sebesar 9.1 tahun pada 2010.



Sumber : Data diolah

Gambar IV.2.3
Persentase Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2006-2010

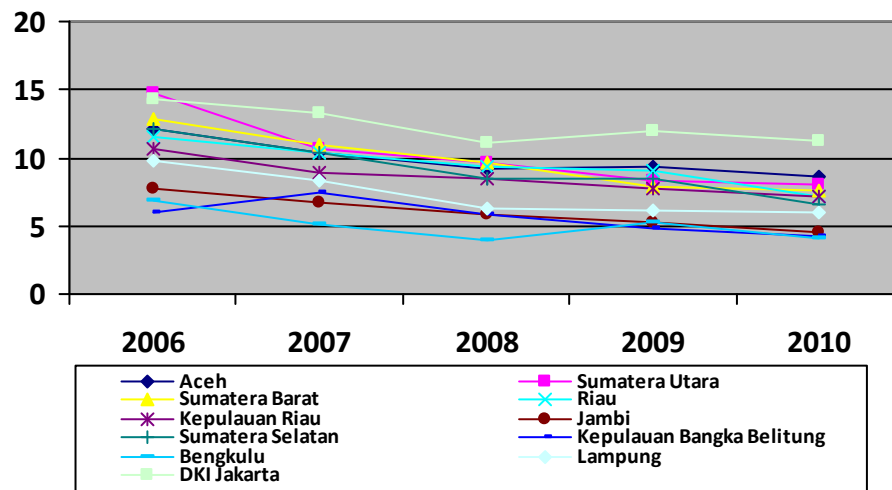
Keadaan rata-rata lama sekolah sebelas propinsi yang digambarkan pada gambar IV.2.3 tidak semua mengalami peningkatan secara terus menerus. Propinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 0.1 tahun di tahun 2008 setelah mengalami peningkatan dari tahun 2006-2007 sebesar 0.2 tahun menjadi 7.8 tahun. Propinsi Papua mengalami rata-rata lama sekolah penduduknya

naik-turun hingga akhir 2010 sebesar 6.3 tahun menurun sebesar 0.1 tahun dari tahun 2009.

Gambar IV.2. diatas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Indonesia tahun 2006-2010 terbesar yakni propinsi yaitu propinsi DKI Jakarta sebesar 10,2 tahun pada tahun 2006 dan berangsur meningkat hingga 10,4 tahun di tahun 2010. Sedangkan rata-rata lama pendidikan yang paling rendah adalah propinsi Papua dengan berada pada 6,3 tahun sampai dengan akhir tahun 2010.

3. Tingkat Pengangguran

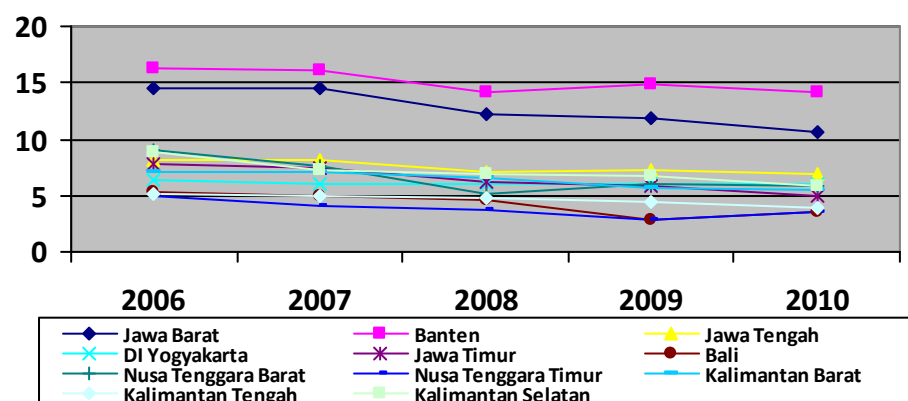
Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa penyebab pengangguran adalah akibat dari sistem pendidikan yang tidak mampu meluluskan lulusannya sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mana hal ini akan berpengaruh pada kehidupan penduduk yang kurang mampu sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Secara umum, sebagian besar rumah tangga tergantung pada upah atau gaji yang diterimanya sehingga pengangguran akan menyebabkan hilangnya penerimaan dan pada akhirnya penduduk yang menganggur tersebut harus hidup di bawah garis kemiskinan.



Sumber : Dara diolah

Gambar IV.3.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2006-2010

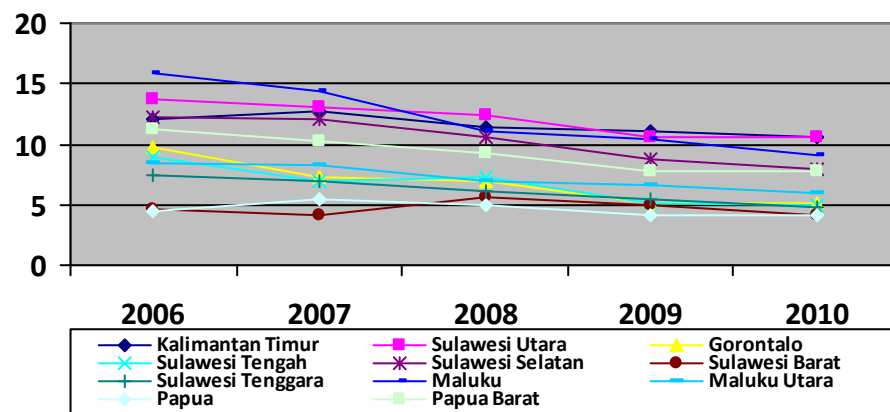
Tingkat Pengangguran Terbuka sebelas propinsi pada gambar IV.3.1 ada beberapa propinsi yang mengalami fluktuasi yakni propinsi Aceh yang sempat mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar 9.2% menjadi 9.3% di tahun 2009 dan juga propinsi Bengkulu yang juga mengalami fluktuasi di tahun yang sama mengalami peningkatan 4.0% menjadi 5.3%.



Sumber : Data diolah

Gambar IV.3.2
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2006-2010

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka pada gambar IV.3.2 menggambarkan masing-masing propinsi mengalami keadaan yang berbeda. Propinsi Banten dan Jawa Tengah mengalami peningkatan pengangguran pada tahun 2009 sebesar 0.7% dari tahun 2008, dan 0.2% untuk Jawa Tengah. Propinsi Nusa Tenggara Barat juga mengalami hal yang sama peningkatan pengangguran terbuka sebesar 0.9%. Propinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur justru mengalami peningkatan secara bersamaan di tahun 2010 sebesar 0.7%.



Sumber : Data diolah

Gambar IV.3.3
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2006-2010

Tingkat pengangguran terbuka dari gambar IV.3.3 menggambarkan keadaan propinsi Kalimantan Timur dan Papua mengalami peningkatan pengangguran di tahun 2007 masing-masing sebesar 0.0% dan 1% dari tahun 2006. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat juga mengalami peningkatan angka pengangguran pada tahun 2008 dibandingkan 2007 masing-masing sebesar 0.3% dan 1.6%.

diakhir tahun 2010 peningkatan pengangguran terjadi di propinsi Papua Barat sebesar 0.1% menjadi 7.8% dari tahun 2009.

Gambar IV. 3 diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di provinsi Indonesia pada tahun 2006-2010 tertinggi yaitu di propinsi yaitu Banten dengan tingkat penganggurannya 14,6 persen di tahun 2006. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka yang paling rendah yaitu di propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 3,5 persen di tahun yang sama. Ibu kota Jakarta juga memiliki angka pengangguran yang tinggi yang disebabkan oleh meningkatnya pendatang dari daerah untuk mencari pekerjaan di Jakarta, sedangkan hal tersebut tidak diimbangi dengan banyaknya kesempatan kerja yang diberikan serta tidak sesuainya keahlian atau karakteristik dari pencari kerja tersebut.

B. Analisis Data

1. Estimasi Model

Model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga model estimasi, yaitu *common effects*, *fixed effects*, dan *random effects* yang memiliki asumsi berbeda terhadap intersepnya. Model *common effects* mengasumsikan bahwa dalam berbagai kurun waktu, tingkat kemiskinan dari setiap propinsi adalah sama. Berbeda dengan model *fixed effects* mengasumsikan bahwa dalam berbagai kurun waktu, tingkat kemiskinan untuk setiap propinsi berbeda, yaitu dengan nilai intersep pada model estimasi yang berbeda untuk setiap propinsi.

Sama halnya dengan model *fixed effects*, model *random effects* juga mengasumsikan bahwa dalam berbagai kurun waktu, tingkat kemiskinan dari setiap propinsi adalah berbeda. Namun terdapat perbedaan dalam sifat intersepnnya, pada model *fixed effects* intersep bersifat tetap (*non-stochastic*) sedangkan pada model *random effects* intersep diasumsikan bersifat acak (*stochastic*) (Lampiran 3).

Pemilihan model estimasi terbaik akan dilakukan terhadap ketiga jenis model tersebut. Untuk menentukan model estimasi terbaik tersebut akan dilakukan beberapa prosedur pengujian formal, yaitu: uji statistik F untuk memilih antara model *common effects* atau *fixed effects*; uji *Langrange Multiplier* (LM) untuk memilih antara *common effects* atau *random effects*; uji Hausman untuk memilih antara model *fixed effects* atau *random effects*. (Lampiran 4)

2. Pemilihan Model Terbaik

Tahapan awal pemilihan model regresi terbaik adalah pengujian signifikansi model *fixed effects*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model estimasi *fixed effects* lebih baik dari model regresi *common effects*. Berdasarkan hasil penghitungan, ternyata diperoleh nilai F-statistik 254,131580 yang lebih besar daripada nilai kritis $F_{(0,05, 32, 130)} = 1,533$. Dengan demikian hipotesis nol ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada alpha lima persen, intersep untuk setiap propinsi adalah berbeda, yang artinya bahwa model *fixed effects* lebih baik dari *common effects* (Lampiran 5).

Tahapan berikutnya adalah melakukan pengujian signifikansi model *random effects*. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model *random effects* lebih baik dari model *common effects*. Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh LM-*statistic* = 311,9141 yang lebih besar daripada nilai kritis $\chi^2_{(0,05,1)} = 3,841$. Dengan demikian, hipotesis nol dapat ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada alpha lima persen, intersep setiap negara merupakan random/stokastik, yang artinya model *random effects* lebih baik dari model *common effects* (Lampiran 6).

Berdasarkan pengujian tahap kedua diperoleh model *random effects* lebih baik dari model *common effects*. Merujuk pada tahap pertama yang menyatakan bahwa model *fixed effects* lebih baik daripada *common effects*, maka peneliti dihadapkan pada pemilihan mana yang lebih baik antara *fixed effects* dan *random effects*. Uji formal untuk mengetahui apakah model *random effects* lebih baik dari *fixed effects* adalah Uji Hausman.

Kemudian melakukan pengujian Hausman (fixed effect vs random effect) dengan Eviews6,

H_0 : Model estimasi random effect lebih baik dari fixed effect

H_1 : Model estimasi random effect lebih baik dari fixed effect

Alpha : 5%

Ketentuan: Tolak H_0 jika p-value < alpha

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: UGI
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.013343	2	0.1344

Keputusan : Tidak tolak H_0 , karena p-value $>$ alpha

Kesimpulan : model random effect lebih baik digunakan dibanding model fixed effect (Lampiran 7).

Peneliti memutuskan tidak memakai *random effects* sebagai model terbaik. Keputusan ini juga didukung oleh alasan-alasan lain berkaitan dengan ukuran statistik yang dihasilkan oleh metode *random effects* yang tidak mendukung penelitian. Sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah persamaan regresi data panel dengan teknik *fixed effects* (Lampiran 8).

3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Heterokedastisitas

Setelah *fixed effects* terpilih, selanjutnya dilakukan identifikasi struktur matriks varian-kovarian *residual*. Penyesuaian model regresi berdasarkan matriks varians kovarians bertujuan untuk menghindari model *fixed effects* yang bias bila terdapat heteroskedastisitas. Statistik uji yang digunakan adalah statistik LM (*Langrange Multiplier*). Hasil penghitungan pengujian LM menunjukkan hasil yang signifikan, diperoleh nilai LM-statistic = 81,50569 yang lebih besar dari $X^2_{(0,05;32)} = 46,19426$. Dengan demikian maka hipotesis null ditolak, yang berarti bahwa model *fixed effect* yang terbentuk mengandung masalah

heterokedastisitas dan untuk mengatasinya dipakai penimbang *cross section weights* pada fixed effect model (lampiran 9).

b. Uji Autokolinearitas

Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi struktur matriks varians kovarians residual yang bersifat heteroskedastik terhadap ada atau tidak adanya *cross sectional correlation*. Hasil penghitungan pengujian λLM diperoleh nilai sebesar 1017,547 yang lebih besar dari wilayah kritis $X^2_{(0,05;528)} = 582,5641$. Hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak sehingga struktur varians kovarians diketahui memiliki sifat heteroskedastik dan terdapat *cross serial correlation (seemingly uncorrelated regression/SUR)*. Namun penerapan estimator SUR tidak dapat dilakukan pada Eviews karena jumlah n yang lebih besar dari T sehingga dikhawatirkan akan masih terdapat masalah autokorelasi. Oleh sebab itu diperlukan *robust estimator* yang membuat persamaan menjadi kebal terhadap autokorelasi. Dalam penelitian ini digunakan Cross section SUR (PCSE) standard errors dan merupakan model final yang digunakan untuk diinterpretasikan (Lampiran 10).

c. Uji Normalitas

Persamaan regresi data panel yang terpilih adalah model *fixed effects* dengan *cross-sections weight*. Asumsi normalitas dari *residual* telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi uji Jarque-Bera yang menunjukkan *probability* (p-value = 0,6) lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar lima persen. Oleh karena itu hipotesis nul tidak dapat

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *residual* berdistribusi normal (lampiran 11)

d. Multikolinieritas

Asumsi non multikolinieritas juga telah terpenuhi. Nilai koefisien korelasi antara variabel independen kurang dari 0,85. Nilai *variance inflation factor* (VIF) seluruh variabel independen lebih kecil dari 10. sehingga asumsi Non-Multikolinieritas juga telah terpenuhi (lampiran 12).

4. Pengujian Kriteria Statistik

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Dari regresi pengaruh pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia tahun 2006 - 2010 dengan membandingkan F_{hitung} dengan nilai $F_{(\alpha, n+k-1, nT-n-k)}$, Pada tabel (model final) diperoleh nilai $F_{hitung} = 489,0536$ sedangkan nilai $F_{(0,05, 34, 130)} = 1,522$. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat diputuskan untuk menolak H_0 . Sehingga diperoleh kesimpulan pada tingkat kepercayaan 95% peneliti dapat menyatakan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama (simultan) signifikan mempengaruhi variabel dependennya. Keputusan untuk menolak

H_0 juga bisa dilakukan dengan melihat nilai *probability* dari uji F sebesar 0.0000 . karena diperoleh nilai p-value sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari alpha (0,05) maka peneliti juga dapat mengambil keputusan untuk tidak menerima H_0 (Lampiran 13).

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

1. Untuk variabel Rata-rata bersekolah diperoleh nilai $t_{hitung} = -9,235$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 1,978$. Karena nilai $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ maka peneliti dapat mengambil keputusan untuk menolak H_0 . Keputusan ini juga dapat diambil dengan memperhatikan nilai p-value sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Karena p-value < alpha (5%) maka dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% bahwa variabel Rata-rata Lama Bersekolah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Persentase Kemiskinan pada 33 wilayah penelitian. Koefisien Rata-rata Lama Bersekolah sebesar -2,202 memiliki makna jika terjadi kenaikan Rata-rata Lama Bersekolah satu tahun akan menyebabkan persentase kemiskinan menurun sebesar 2,202 persen.
2. Untuk variabel Persentase Pengangguran diperoleh nilai $t_{hitung} = 17,519$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 1,987$. Kerena nilai $|t_{hitung}| > t_{tabel}$

maka peneliti dapat mengambil keputusan untuk menolak H_0 . Keputusan ini juga dapat diambil dengan memperhatikan nilai p-value sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Karena $p\text{-value} < \alpha$ (5%) maka dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% bahwa variabel Persentase Pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Kemiskinan pada 33 provinsi di Indonesia. Koefisien Persentase Pengangguran sebesar 0,6776 memiliki makna jika terjadi kenaikan Persentase Pengangguran sebesar 1 persen akan menyebabkan Persentase Kemiskinan meningkat sebesar 0,6776 persen. (Lampiran 14)

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R-Square)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dari hasil regresi pengaruh pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia tahun 2006 - 2010 diperoleh nilai *R-Square* sebesar 0,9902 maka dapat dinyatakan

bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan keragaman nilai pada variabel persentase kemiskinan sebesar 99,02 persen variasi kemiskinan di Indonesia dapat dijelaskan oleh variasi dua variabel independennya yakni Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah), dan Pengangguran. sedangkan sisanya 0,98 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang berada di luar model penelitian. (Lampiran 15).

C. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Variabel Pendidikan yang diproksi dengan rata-rata lama sekolah menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan di Indonesia selama 1 tahun akan menurunkan kemiskinan sebesar 2,20 persen. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Menurut Simmons (dalam Todaro, 1994), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih

tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Profan Ali Azami yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien variabel SLTP sebesar 0,253.

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Dari hasil regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran menunjukkan tanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dimana kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 1 persen menaikkan kemiskinan sebesar 0,677 persen. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Menurut Lincolind Arsyad (dalam Ravi Dwi Wijayanto, 2010) menyatakan bahwa ada pengaruh yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. “Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin”. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas.

Dijelaskan pula lebih luas oleh Sadono Sukirno, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada

akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani dengan penelitiannya yang berjudul Inflasi, pengangguran dan kemiskinan, yang menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan dan begitu pula sebaliknya dengan koefisiennya sebesar 0,183. Penelitian Dian Octaviani juga didukung oleh penelitian Blank & Blinder tahun 1985 yang menghasilkan temuan adanya pengaruh yang kuat antara tingkat kemiskinan dengan berbagai variabel ekonomi makro seperti tingkat pengangguran.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Variabel pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan pengangguran secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Adam Smith dalam Supriyatno mengakui bahwa, pendidikan dan latihan akan dapat

meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja serta meyakini bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu bangsa sangat bergantung pada keunggulan inteligensi dan intelektualitas. Kemiskinan yang digambarkan dalam lingkaran setan Nurkse dalam Jhingan, menjelaskan tentang deretan kekuatan yang melingkar yang saling bereaksi satu sama lain sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total dari negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal yang menyebabkan produktivitas menjadi rendah. Rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah sehingga mengakibatkan investasi berada pada tingkat yang rendah dan kembali menyebabkan modal berkurang. Tingkat pendidikan yang rendah juga bermula dari pendapatan yang rendah yang menyebabkan produktivitas rendah serta produksi yang rendah juga sehingga berakhir pada pendapatan yang rendah.

Hasil dua variabel independent yang secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependentnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Simons dalam Todaro dan Sadono Sukirno, bahwa pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan serta adanya efek buruk dari meningkatnya pengangguran terhadap kemiskinan.

Penelitian ini juga didukung oleh yang oleh Dian Octaviani yang menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*) sebesar 0,736. Penelitian yang dilakukan oleh Profan Ali Azami menunjukkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,999, begitu pula hasil penelitian oleh Ravi Dwi Wijayanto dalam pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan menghasilkan nilai koefisien determinasinya sebesar 0,9995. Nilai *adjusted R²* yang besar itu menunjukkan pengaruh yang sangat kuat antar variabel bebas dengan variabel terikatnya.

D. Keterbatasan Hasil Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Unsur variabel yang mempengaruhi kemiskinan sangat luas, hanya saja peneliti hanya menggunakan dua variabel. Hasil penghitungan yang menyatakan bahwa 99% variabel independent mempengaruhi dependennya masih dirasa cukup kurang, karena hanya dua dari banyak variabel independent terhadap kemiskinan.
2. Dari segi waktu penelitian yang digunakan kurang lama. Sebaiknya waktu penelitian yang dipakai lebih lama atau menggunakan waktu (periode) dari masa pemerintahan khusus. Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menarik sehingga hasil penelitian benar-benar jelas dapat dijadikan sebagai rujukan/gambaran dalam pengambilan keputusan untuk pihak-pihak terkait.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel Pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan Pengangguran terhadap Kemiskinan penduduk di Indonesia tahun 2006 - 2010. Berdasar hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) Pendidikan dan Pengangguran terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia tahun 2006 - 2010 menunjukkan bahwa besarnya nilai R^2 cukup tinggi yaitu 0,9902. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk cukup baik dimana 99,02 persen variasi variabel dependen kemiskinan dapat dijelaskan dengan baik oleh kedua variabel independen yakni Pendidikan dan pengangguran. Sedangkan 0,98 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model.
2. Variabel Pendidikan (rata-rata lama sekolah) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan. Yang mana memiliki nilai koefisien β sebesar -2,202 yang artinya, apabila rata-rata lama sekolah penduduk naik sebesar 1 tahun, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 2,202 persen.

3. Variabel Pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan. Yang mana memiliki nilai koefisien β sebesar 0.677 yang artinya, apabila kenaikan jumlah pengangguran sebesar 1 persen akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 0,677 persen.
4. Berdasarkan perhitungan dengan uji F (uji simultan) diperoleh nilai $F_{hitung} = 489,0536$ sedangkan nilai $F_{tabel} = 1,522$. Maka nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen kedua variabel independen (rata-rata lama bersekolah dan persentase pengangguran) secara bersama-sama terbukti signifikan mempengaruhi angka Persentase Penduduk Miskin pada setiap provinsi di Indonesia.

B. Implikasi

Pemerintah nyatanya tidak hanya diam melihat keadaan kmiskinan yang dialami penduduk di Indonesia. Beberapa pembangunan dari berbagai sektor yang dilakukan oleh Pemerintah adalah :

1. Pembangunan Sumberdaya Manusia

Peningkatan lembaga pendidikan, merupakan langkah yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah juga harus memberikan beasiswa pada siswa yang berpretasi guna memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, serta memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Penyerapan Tenaga Kerja

Meningkatkan pengadaan program padat karya terutama yang banyak menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin.

C. Saran

1. Pendidikan yang tercermin dari rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga diharapkan pemerintah di seluruh propinsi di Indonesia kembali menggalakkan program Wajib Belajar Sembilan Tahun guna menekan angka kemiskinan di Indonesia. Dan lebih jauh lagi, pemerintah dapat ikut menggalakkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang dijalankan oleh program pendidikan universal. Dapat dilakukan juga dengan menambah jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada jurusan yang menyerap tenaga kerja di sektor ekonomi seperti sektor industri, pertanian dan jasa. Produktivitas yang tinggi akan memperoleh penghasilan yang tinggi dan dapat terlepas dari kemiskinan.
2. Pengangguran berdasarkan hasil penelitian berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan hasil tersebut diharapkan Pemerintah Indonesia tetap ikut menggerakkan sektor informal. Karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran terbuka, yang mana di dalamnya terdapat golongan

masyarakat yang sedang dalam tahap menyiapkan usaha. Oleh karena itu, sektor informal dirasa cukup baik untuk menekan angka pengangguran terbuka dan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Sektor informal sebagai sektor alternatif yang cukup memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan. Selain membuka kesempatan kerja, sektor informal juga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat kota. Namun, pertumbuhan sektor informal yang pesat tanpa mendapat penanganan yang baik dan terencana akan menimbulkan persoalan bagi kota. Untuk itu, pemerintah kota harus jeli dalam menangani masalah sektor informal itu. Sehingga, sektor informal dapat tumbuh dengan subur tanpa mengganggu kepentingan umum, terutama tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan keindahan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Deny Tisna. *Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesiatahun 2003-2004*. Semarang: UNDIP, 2008.
- Ala, Andre Bayo. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta : Liberty, 1996.
- Ancok, Djamaluddin. *Pemanfaatan Organisasi Lokal Untuk Mengentaskan Kemiskinan*. Suntingan Ririn Handayani. Jakarta: Khanata, 2006.
- Aribowo. *Faktor Penyebab dan Pengentasan Kemiskinan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1996.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Tingkat Kemiskinan Indonesia*. Jakarta: BPS-RI, 2010.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Tingkat Pengangguran Indonesia: Penduduk dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: BPS-RI, 2010.
- Basri, Zainuddin dkk. *Problem of Proverty In Indonesia*. Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2010.
- Case, Karl E., dan Ray C. Fair. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. suntingan Y. Andri Zaimur. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Dewantoro, Bagus. *Teori Modal Manusia: Konsep Pendidikan*. 2010.<http://bagusdewan.blogspot.com/2010/04/konsep-pendidikan.html> (Diakses tanggal 26 Februari 2012).
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Editor, *Definisi Kemiskinan: Kemiskinan di Indonesia*, 2005, <http://worldbank.org/in/country/indonesia/definisi+kemiskinan/Maret2008/html> (Diakses tanggal 26 Februari 2012).
- Greene, William H. *Econometric Analysis*. Fifth Edition. New York University. 2002
- Hagul, Peter. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Suntingan Noor. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Hermanto S., dan Dwi W., *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Indonesia : Proses Pemerataan dan Pemiskinan*, Bogor:

- Direktur Kajian Ekonom Institusi Pertanian Bogor, 2001.
- Irawan. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat, 1997.
- Irawan dan Suparmoko. *Ekonomika Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta:BPFE, 1992.
- Kartasasmita, G. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Lestari, Ririn. *Definisi Pendidikan*. 2011.
<http://www.rentcost.com/2011/12/pengertian-pendidikan-definisi.html>
 (Diakses tanggal 28 Februari 2012).
- Octaviani, Dian. *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*. Media Ekonomi. September 2001,8, pp. 100-118.
- Prastyo, Adit Agus. *Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Purnomo, Didit. “Distribusi Pendapatan di Indonesia”: Proses Pemerataan dan Pemiskinan”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Juni 2000, 1, pp. 47 – 59.
- Rahardjo, M. Dawam. *Menuju Indonesia Sejahtera*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Sahdan, Gregorius. “Menanggulangi Kemiskinan Desa”, *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Maret 2005, 1, pp. 33-45.
- Siahaan, Harlem. “Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi”, *Prisma*. Mei 1995, 1, pp. 17- 31.
- Simatupang, Pantjar dan Saktyanu K. Dermoredjo. “Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan”, *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Maret 2003, 3, pp. 191 – 324.
- Sudjana. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito, 2007.
- Sumarga, Prima. “Analisis Penyebab Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Maret 2001, 2, pp. 35-62.
- Supriyatno. *Perbedaan Tingkat Kecemasan Menghadapi Kecenderungan Impotensi Ditinjau dari Tingkat Pendidikan*. Semarang: Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945, 2001.

- Suselo, Sri Liani dan Tasidim. "Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Moneter*, Juni 2008, 2, pp. 157-181.
- Suwarno. *Kemiskinan dan Kesejahteraan*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2008.
- Tambunan, Tulus H., *Perekonomian Indonesia*, Terjemahan Haris Munandar, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- The World Employment Conference* tahun 1976 diselenggarakan oleh *International Labour Organization* (ILO) di Genewa, Swiss. Dikutip dari buku Richard and P. J and Thomson. *Basic Needs and Urban Poor*. terjemahan M. Dawam Rahardjo. Jakarta: Khanata, 2006.
- The World Bank. "Understanding Poverty", *Jurnal Kemiskinan dan Pembangunan*. September 2000, 2, pp. 99-200.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Angka Kemiskinan*. Jakarta: Berita TNP2K. 2010.
- Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Wahyudi, Hendra dan Sismudjito. "Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Keluarga Miskin", *Jurnal Harmoni Sosial*. Januari 2007, 1, pp. 83-95.
- Winardi. *Pendidikan Di Indonesia*. 2010. <http://andalasvanjava-online.com/pendidikan-indonesia/january2010/htm> (Diakses tanggal 28 Februari 2012).
- Wijayanto, Ravi Dwi. *Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan: Latar Belakang Teoretis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Lampiran 1

**Tabel Persentase Penduduk Miskin per Provinsi
2006-2010**

No.	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Aceh	28.3	26.7	23.5	21.8	21.0
2	Sumatera Utara	15.0	13.9	12.6	11.5	11.3
3	Sumatera Barat	12.5	11.9	10.7	9.5	9.5
4	Riau	11.9	11.2	10.6	9.5	8.7
5	Kepulauan Riau	12.2	10.3	9.2	8.3	8.1
6	Jambi	11.4	10.3	9.3	8.8	8.3
7	Sumatera Selatan	21.0	19.2	17.7	16.3	15.5
8	Kepulauan Bangka Belitung	10.9	9.5	8.6	7.5	6.5
9	Bengkulu	23.0	22.1	20.6	18.6	18.3
10	Lampung	22.8	22.2	21.0	20.2	18.9
11	DKI Jakarta	4.6	4.6	4.3	3.6	3.5
12	Jawa Barat	14.5	13.6	13.0	12.0	11.3
13	Banten	9.8	9.1	8.2	7.6	7.2
14	Jawa Tengah	22.2	20.4	19.2	17.7	16.6
15	DI Yogyakarta	19.2	19.0	18.3	17.2	16.8
16	Jawa Timur	21.1	20.0	18.5	16.7	15.3
17	Bali	7.1	6.6	6.2	5.1	4.9
18	Nusa Tenggara Barat	27.2	25.0	23.8	22.8	21.6
19	Nusa Tenggara Timur	29.3	27.5	25.7	23.3	23.0
20	Kalimantan Barat	15.2	12.9	11.1	9.3	9.0
21	Kalimantan Tengah	11.0	9.4	8.7	7.0	6.8
22	Kalimantan Selatan	8.3	7.0	6.5	5.1	5.2
23	Kalimantan Timur	11.4	11.0	9.5	7.7	7.7
24	Sulawesi Utara	11.5	11.4	10.1	9.8	9.1
25	Gorontalo	29.1	27.4	24.9	25.0	23.2
26	Sulawesi Tengah	23.6	22.4	20.8	19.0	18.1
27	Sulawesi Selatan	14.6	14.1	13.3	12.3	11.6
28	Sulawesi Barat	20.7	19.0	16.7	15.3	13.6
29	Sulawesi Tenggara	23.4	21.3	19.5	18.9	17.1
30	Maluku	33.0	31.1	29.7	28.2	27.7
31	Maluku Utara	12.7	12.0	11.3	10.4	9.4
32	Papua	41.5	40.8	37.1	37.5	36.8
33	Papua Barat	41.3	39.3	35.1	35.7	34.9
	Indonesia	17.8	16.6	15.4	14.2	13.3

Lampiran 2

**Tabel Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Provinsi 2006-2010**

No.	Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Aceh	7.7	8.3	8.3	8.6	8.8
2	Sumatera Utara	8.5	8.5	8.5	8.6	8.8
3	Sumatera Barat	8.1	8.2	8.3	8.5	8.5
4	Riau	8.1	8.2	8.5	8.6	8.6
5	Kepulauan Riau	8.6	9	8.1	8.1	9.6
6	Jambi	7.5	7.7	7.6	7.7	7.8
7	Sumatera Selatan	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8
8	Kepulauan Bangka Belitung	6.9	7.2	7.4	7.4	7.4
9	Bengkulu	7.7	7.8	7.8	8.2	8.2
10	Lampung	7	7.2	7.2	7.7	7.7
11	DKI Jakarta	10.2	10.2	10.2	10.3	10.4
12	Jawa Barat	7.5	7.5	7.5	7.7	8
13	Banten	7.8	7.7	7.7	8	8.3
14	Jawa Tengah	6.9	6.8	6.9	7.1	7.2
15	DI Yogyakarta	8.6	8.6	8.7	8.8	9.1
16	Jawa Timur	6.9	6.9	7	7.2	7.2
17	Bali	7.6	7.6	7.8	7.8	8.2
18	Nusa Tenggara Barat	6.3	6.6	6.5	6.6	6.6
19	Nusa Tenggara Timur	6.3	6.5	6.4	6.6	7
20	Kalimantan Barat	6.5	6.6	6.6	6.6	6.8
21	Kalimantan Tengah	7.8	7.7	7.7	7.8	8
22	Kalimantan Selatan	7.3	7.4	7.4	7.5	7.7
23	Kalimantan Timur	8.4	8.6	8.7	8.7	8.8
24	Sulawesi Utara	8.7	8.7	8.7	8.8	8.9
25	Gorontalo	6.8	6.9	6.9	7.2	7.4
26	Sulawesi Tengah	7.7	7.7	7.8	7.9	8
27	Sulawesi Selatan	7.2	7.3	7.3	7.4	7.8
28	Sulawesi Barat	6.3	6.5	7	7.1	7.1
29	Sulawesi Tenggara	7.6	7.8	7.7	7.9	8.1
30	Maluku	8.4	8.5	8.5	8.6	9
31	Maluku Utara	7.6	7.9	7.9	8.2	8.4
32	Papua	6	6.5	6.3	6.4	6.3
33	Papua Barat	7	7.7	7.7	8.2	9.2
	Indonesia	7.5	7.5	7.5	7.7	7.9

Lampiran 3

**Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi
2006-2010**

No.	Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Aceh	12.1	10.3	9.2	9.3	8.6
2	Sumatera Utara	14.8	10.6	9.6	8.3	8.0
3	Sumatera Barat	12.9	11.0	9.7	7.9	7.6
4	Riau	11.5	10.4	9.4	9.0	7.2
5	Kepulauan Riau	10.7	8.9	8.5	7.8	7.2
6	Jambi	7.8	6.7	5.9	5.2	4.5
7	Sumatera Selatan	12.1	10.4	8.5	8.4	6.6
8	Kepulauan Bangka Belitung	6.0	7.4	5.8	4.8	4.2
9	Bengkulu	6.9	5.1	4.0	5.3	4.1
10	Lampung	9.8	8.3	6.3	6.2	6.0
11	DKI Jakarta	14.3	13.3	11.1	12.0	11.3
12	Jawa Barat	14.5	14.5	12.3	11.9	10.6
13	Banten	16.3	16.1	14.2	14.9	14.1
14	Jawa Tengah	8.2	8.1	7.1	7.3	6.9
15	DI Yogyakarta	6.3	6.1	6.0	6.0	6.0
16	Jawa Timur	7.7	7.5	6.2	5.9	4.9
17	Bali	5.3	4.9	4.6	2.9	3.6
18	Nusa Tenggara Barat	9.0	7.6	5.2	6.1	5.8
19	Nusa Tenggara Timur	5.0	4.0	3.7	2.8	3.5
20	Kalimantan Barat	7.1	7.1	6.5	5.6	5.5
21	Kalimantan Tengah	5.1	5.0	4.8	4.5	3.9
22	Kalimantan Selatan	8.8	7.3	6.9	6.8	5.9
23	Kalimantan Timur	12.1	12.8	11.4	11.1	10.5
24	Sulawesi Utara	13.7	13.0	12.4	10.6	10.5
25	Gorontalo	9.8	7.26	7.0	5.1	5.1
26	Sulawesi Tengah	8.9	7.0	7.3	5.1	4.9
27	Sulawesi Selatan	12.3	12.0	10.5	8.7	8.0
28	Sulawesi Barat	4.64	4.1	5.7	4.9	4.1
29	Sulawesi Tenggara	7.4	6.9	6.1	5.4	4.8
30	Maluku	15.8	14.4	11.1	10.4	9.1
31	Maluku Utara	8.5	8.3	7.0	6.6	6.0
32	Papua	4.5	5.5	4.9	4.1	4.1
33	Papua Barat	11.2	10.2	9.3	7.7	7.8
	Indonesia	10.5	9.8	8.5	8.1	7.4

Lampiran 4
ESTIMASI PANEL

1. Common Effect

Dependent Variable: KEMISKINAN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/07/12 Time: 20:27

Sample: 2006 2010

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	49.55651	5.761065	8.601969	0.0000
RATA_SEKOLAH?	-4.434941	0.808287	-5.486841	0.0000
PENGANGGURAN?	0.171974	0.221738	0.775572	0.4391
R-squared	0.171192	Mean dependent var	16.44927	
Adjusted R-squared	0.160960	S.D. dependent var	8.697527	
S.E. of regression	7.966858	Akaike info criterion	7.006472	
Sum squared resid	10282.28	Schwarz criterion	7.062944	
Log likelihood	-575.0339	Hannan-Quinn criter.	7.029396	
F-statistic	16.73074	Durbin-Watson stat	0.030533	
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Random Effect

Dependent Variable: KEMISKINAN?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/07/12 Time: 20:28

Sample: 2006 2010

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 165

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.24899	3.760804	8.575023	0.0000
RATA_SEKOLAH?	-2.768209	0.401368	-6.896944	0.0000
PENGANGGURAN?	0.711077	0.076775	9.261859	0.0000
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	8.021970			
_SUMUT--C	-2.920809			
_SUMBAR--C	-5.363353			
_RIAU--C	-5.350800			
_KEPRIAU--C	-4.735051			
_JAMBI--C	-5.685699			
_SUMSEL--C	0.298180			

_KEPBANGKA--C	-7.528474
_BENGKULU--C	6.628433
_LAMPUNG--C	3.942306
_DKI--C	-8.511634
_JABAR--C	-7.277249
_BANTEN--C	-12.72639
_JATENG--C	0.953946
_DIY--C	5.761103
_JATIM--C	0.961706
_BALI--C	-7.675230
_NTB--C	5.060993
_NTT--C	8.952919
_KALBAR--C	-6.906425
_KALTENG--C	-5.381597
_KALSEL--C	-10.20063
_KALTIM--C	-7.068126
_SULUT--C	-6.143642
_GORONTALO--C	8.259463
_SULTENG--C	5.432277
_SULBAR--C	-5.887467
_SULTENGGARA--C	0.315554
_MALUKU--C	5.076785
_MALUT--C	12.83865
_PAPUA--C	-4.133855
_PAPUABARAT--C	20.57362
--C	20.41852

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		8.166599	0.9817
Idiosyncratic random		1.115569	0.0183
Weighted Statistics			
R-squared	0.622773	Mean dependent var	1.003017
Adjusted R-squared	0.618116	S.D. dependent var	1.816406
S.E. of regression	1.122480	Sum squared resid	204.1137
F-statistic	133.7249	Durbin-Watson stat	1.111516
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.078557	Mean dependent var	16.44927
Sum squared resid	11431.52	Durbin-Watson stat	0.019846

3. Fixed Effect

Dependent Variable: KEMISKINAN?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/07/12 Time: 20:18
Sample: 2006 2010
Included observations: 5
Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.18564	3.645139	8.281067	0.0000
RATA_SEKOLAH?	-2.543208	0.418741	-6.073458	0.0000
PENGANGGURAN?	0.749965	0.079196	9.469715	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH—C	7.854063			
_SUMUT--C	-3.197554			
_SUMBAR--C	-5.574303			
_RIAU—C	-5.565859			
_KEPRIAU--C	-4.977291			
_JAMBI—C	-5.600956			
_SUMSEL--C	0.286792			
_KEPBANGKA--C	-7.345752			
_BENGKULU--C	6.732610			
_LAMPUNG--C	4.080627			
_DKI—C	-9.270389			
_JABAR—C	-7.455582			
_BANTEN--C	-13.07626			
_JATENG--C	1.158216			
_DIY—C	5.638576			
_JATIM—C	1.194270			
_BALI—C	-7.560969			
_NTB—C	5.414812			
_NTT—C	9.426437			
_KALBAR--C	-6.605380			
_KALTENG--C	-5.274954			
_KALSEL--C	-10.13106			
_KALTIM--C	-7.425415			
_SULUT—C	-6.542214			
_GORONTALO--C	8.503785			
_SULTENG--C	5.498480			
_SULBAR--C	-5.912038			
_SULTENGGARA--C	0.667839			
_MALUKU--C	5.161961			
_MALUT--C	12.54288			
_PAPUA—C	-4.170219			
_PAPUABARAT--C	21.11673			
_--C	20.40812			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986959	Mean dependent var	16.44927
Adjusted R-squared	0.983549	S.D. dependent var	8.697527
S.E. of regression	1.115569	Akaike info criterion	3.242438
Sum squared resid	161.7843	Schwarz criterion	3.901275
Log likelihood	-232.5011	Hannan-Quinn criter.	3.509883
F-statistic	289.3762	Durbin-Watson stat	1.376778
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5PEMILIHAN MODEL

Fixed vs Common

H_0 : Common Effect lebih baik dari Fixed Effect

H_1 : Fixed effect lebih baik dari common effects

Alpha: 5%

Ketentuan : tolak H_0 jika nilai p-value < alpha.

Hasil pengujian dengan eviews:

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: KEMISKINAN

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	254.131580	(32,130)	0.0000
Cross-section Chi-square	685.065645	32	0.0000

Lampiran 6

Common vs Random

H_0 : model estimasi common effect lebih baik dibandingkan dengan random effect

H_1 : model estimasi random effect lebih baik dibandingkan dengan common effect

Alpha : 5%

Ketentuan: Tolak H_0 jika $LM >$ chi-square dengan derajat bebas 1 (df=1)

Statistik pengujian:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T e_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2 = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n [T \bar{e}_i]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Diperoleh nilai $LM = 311,9141$ dibandingkan dengan chisquare (df=1) = 3,84.

Keputusan: Tolak H_0 , Karena nilai $LM >$ chi square df(1)

Kesimpulan: dengan tingkat kepercayaan 95% model estimasi dengan menggunakan random effect lebih baik digunakan dibanding common effect.

Lampiran 7

Fixed vs Random (Uji Hausman)

H_0 : Model estimasi fixed effect lebih baik dari random effect

H_1 : Model estimasi random effect lebih baik dari fixed effect

Alpha : 5%

Ketentuan: Tolak H_0 jika p-value < alpha

Hasil pengujian dengan menggunakan eviews 6.0 :

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: KEMISKINAN

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.013343	2	0.1344

Keputusan : Tidak tolak H_0 , karena p-value > alpha

Kesimpulan : model random effect lebih baik digunakan dibanding model fixed effect.

Lampiran 8Model Terpilih : Fixed Effect

Dependent Variable: KEMISKINAN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/07/12 Time: 20:51

Sample: 2006 2010

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.18564	3.645139	8.281067	0.0000
RATA_SEKOLAH?	-2.543208	0.418741	-6.073458	0.0000
PENGANGGURAN?	0.749965	0.079196	9.469715	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	7.854063			
_SUMUT--C	-3.197554			
_SUMBAR--C	-5.574303			
_RIAU--C	-5.565859			
_KEPRIAU--C	-4.977291			
_JAMBI--C	-5.600956			
_SUMSEL--C	0.286792			
_KEPBANGKA--C	-7.345752			
_BENGKULU--C	6.732610			
_LAMPUNG--C	4.080627			
_DKI--C	-9.270389			
_JABAR--C	-7.455582			
_BANTEN--C	-13.07626			
_JATENG--C	1.158216			
_DIY--C	5.638576			
_JATIM--C	1.194270			
_BALI--C	-7.560969			
_NTB--C	5.414812			
_NTT--C	9.426437			
_KALBAR--C	-6.605380			
_KALTENG--C	-5.274954			
_KALSEL--C	-10.13106			
_KALTIM--C	-7.425415			
_SULUT--C	-6.542214			
_GORONTALO--C	8.503785			
_SULTENG--C	5.498480			
_SULBAR--C	-5.912038			
_SULTENGGARA--C	0.667839			
_MALUKU--C	5.161961			
_MALUT--C	12.54288			
_PAPUA--C	-4.170219			
_PAPUABARAT--C	21.11673			
_--C	20.40812			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986959	Mean dependent var	16.44927
Adjusted R-squared	0.983549	S.D. dependent var	8.697527
S.E. of regression	1.115569	Akaike info criterion	3.242438
Sum squared resid	161.7843	Schwarz criterion	3.901275
Log likelihood	-232.5011	Hannan-Quinn criter.	3.509883
F-statistic	289.3762	Durbin-Watson stat	1.376778
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 9

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Heterokedastisitas (Uji Lagrange Multiplier)

H_0 : struktur varians-covarians residual bersifat homoskedastik.

H_1 : struktur varians-covarians residual bersifat heteroskedastik.

Secara matematis, statistik uji yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$LM = \frac{T}{2} \sum_{i=1}^n \left[\frac{\hat{\sigma}_i^2}{\hat{\sigma}^2} - 1 \right]^2$$

di mana T adalah jumlah periode waktu, n adalah jumlah individu, $\hat{\sigma}_i^2$ adalah varians residual persamaan ke- i pada kondisi homoskedastik, dan $\hat{\sigma}^2$ adalah *Sum Square Residual (SSR)* persamaan *system* pada kondisi homoskedastik.

Hasil hitungan uji LM diperoleh nilai LM : 81,50569

Sedangkan nilai chisquare df 32 adalah 46,19426

Keputusan Tolak H_0 karena $LM > \text{chi-square (df=32)}$

Kesimpulan model fixed effect yang terbentuk ternyata mengandung masalah heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan memakai penimbang *coss section weights* pada fixed effect model .

Berikut adalah model baru yang telah ditimbang dengan crosssection weight:

Dependent Variable: KEMISKINAN?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 07/07/12 Time: 20:58
 Sample: 2006 2010
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 33
 Total pool (balanced) observations: 165
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.11431	2.657999	10.57725	0.0000
RATA_SEKOLAH?	-2.201861	0.306004	-7.195536	0.0000
PENGANGGURAN?	0.677555	0.049724	13.62634	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	7.794841			
_SUMUT--C	-3.312632			
_SUMBAR--C	-5.631187			
_RIAU--C	-5.675829			
_KEPRIAU--C	-5.245256			
_JAMBI--C	-5.708867			
_SUMSEL--C	0.414668			
_KEPBANGKA--C	-7.344785			
_BENGKULU--C	6.461201			
_LAMPUNG--C	4.167950			
_DKI--C	-9.804118			
_JABAR--C	-7.069492			
_BANTEN--C	-12.60630			
_JATENG--C	1.390891			
_DIY--C	5.159817			
_JATIM--C	1.328696			
_BALI--C	-7.844110			
_NTB--C	5.747303			
_NTT--C	9.532678			
_KALBAR--C	-6.333815			
_KALTENG--C	-5.527973			
_KALSEL--C	-10.09003			
_KALTIM--C	-7.464958			
_SULUT--C	-6.589699			
_GORONTALO--C	8.667030			
_SULTENG--C	5.380702			
_SULBAR--C	-5.620126			
_SULTENGGARA--C	0.757326			
_MALUKU--C	5.006386			
_MALUT--C	12.55754			
_PAPUA--C	-4.300345			
_PAPUABARAT--C	21.37182			
_--C	20.43068			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.992242	Mean dependent var	21.27843
Adjusted R-squared	0.990214	S.D. dependent var	10.90563
S.E. of regression	1.077076	Sum squared resid	150.8120
F-statistic	489.0536	Durbin-Watson stat	1.524045
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.986629	Mean dependent var	16.44927
Sum squared resid	165.8787	Durbin-Watson stat	1.238174

Lampiran 10

2. Uji Autokolinearitas

Secara matematis, statistik uji yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ALM = T \sum_{t=2}^n \sum_{j=1}^{t-1} r_{ij}^2$$

Hasil penghitungan diperoleh nilai ALM sebesar : 1017,547

Nilai chi square : 582,5641

Keputusan : Tolak H_0

Kesimpulan : model fixed effect ternyata juga mengandung masalah autokorelasi , Dalam penelitian ini digunakan robust estimator Cross section SUR (PCSE) standard errors

Sehingga model final yang digunakan untuk diinterpretasikan adalah model berikut:

Dependent Variable: KEMISKINAN?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 07/07/12 Time: 21:04
 Sample: 2006 2010
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 33
 Total pool (balanced) observations: 165
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 Cross-section SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.11431	2.273528	12.36594	0.0000
RATA_SEKOLAH?	-2.201861	0.268616	-8.197072	0.0000
PENGANGGURAN?	0.677555	0.043572	15.55018	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	7.794841			
_SUMUT--C	-3.312632			
_SUMBAR--C	-5.631187			
_RIAU--C	-5.675829			
_KEPRIAU--C	-5.245256			
_JAMBI--C	-5.708867			
_SUMSEL--C	0.414668			
_KEPBANGKA--C	-7.344785			
_BENGKULU--C	6.461201			
_LAMPUNG--C	4.167950			
_DKI--C	-9.804118			
_JABAR--C	-7.069492			

_BANTEN--C	-12.60630
_JATENG--C	1.390891
_DIY--C	5.159817
_JATIM--C	1.328696
_BALI--C	-7.844110
_NTB--C	5.747303
_NTT--C	9.532678
_KALBAR--C	-6.333815
_KALTENG--C	-5.527973
_KALSEL--C	-10.09003
_KALTIM--C	-7.464958
_SULUT--C	-6.589699
_GORONTALO--C	8.667030
_SULTENG--C	5.380702
_SULBAR--C	-5.620126
_SULTENGGARA--C	0.757326
_MALUKU--C	5.006386
_MALUT--C	12.55754
_PAPUA--C	-4.300345
_PAPUABARAT--C	21.37182
_--C	20.43068

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.992242	Mean dependent var	21.27843
Adjusted R-squared	0.990214	S.D. dependent var	10.90563
S.E. of regression	1.077076	Sum squared resid	150.8120
F-statistic	489.0536	Durbin-Watson stat	1.524045
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.986629	Mean dependent var	16.44927
Sum squared resid	165.8787	Durbin-Watson stat	1.238174

Lampiran 11

3. Uji Normalitas

Pengujian Normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera di bawah hipotesis nol bahwa residual menyebar mengikuti distribusi normal. Dengan menggunakan uji jarque bera, perhatikan bahwa nilai probability dari resid tidak signifikan ($> 0,05$). Sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

	RESID?
Mean	-6.46E-17
Median	0.054502
Maximum	2.988068
Minimum	-2.771913
Std. Dev.	1.005711
Skewness	0.129314
Kurtosis	3.313489
Jarque-Bera	1.135498
Probability	0.566800
Sum	-7.11E-15
Sum Sq. Dev.	165.8787
Observations	165
Cross sections	33

Lampiran 12

4. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	rata_sekolah	.806	1.241
	Pengangguran	.806	1.241

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Pada model final, diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0,9902. Nilai ini akan memicu pembaca untuk menduga bahwa terjadi gangguan multikolinieritas, yaitu terdapat korelasi yang kuat antar variabel bebas. Namun, dengan melihat nilai VIF dari tabel di atas, kecurigaan tersebut dapat dihindari karena nilai VIF ternyata lebih kecil dari 10, sehingga asumsi Non-Multikolinieritas juga telah terpenuhi.

Lampiran 13

Pengujian Parameter

1. Uji F (Simultan)

Weighted Statistics			
R-squared	0.992242	Mean dependent var	21.27843
Adjusted R-squared	0.990214	S.D. dependent var	10.90563
S.E. of regression	1.077076	Sum squared resid	150.8120
F-statistic	489.0536	Durbin-Watson stat	1.524045
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pengujian parameter secara simultan dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan nilai $F_{(\alpha, n+k-1, nT-n-k)}$. Pada tabel di atas diperoleh nilai $F_{hitung} = 489,0536$ sedangkan nilai $F_{(0,05, 34, 127)} = 1,522$. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat diputuskan untuk menolak H_0 . Sehingga diperoleh kesimpulan pada tingkat kepercayaan 95% peneliti dapat menyatakan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama (simultan) signifikan mempengaruhi variabel dependennya. Keputusan untuk menolak H_0 juga bisa dilakukan dengan melihat nilai *probability* dari uji F sebesar 0.0000. karena diperoleh nilai p-value sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari alpha (0,05) maka peneliti juga dapat mengambil keputusan untuk tidak menerima H_0 .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen kedua variabel independen (rata-rata lama bersekolah dan persentase pengangguran) secara bersama-sama terbukti signifikan mempengaruhi angka Persentase Penduduk Miskin pada setiap provinsi di Indonesia.

Lampiran 14

2. Uji-t (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.11431	2.018041	13.93149	0.0000
RATA_SEKOLAH?	-2.201861	0.238430	-9.234833	0.0000
PENGANGGURAN?	0.677555	0.038676	17.51886	0.0000

Uji parsial dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai t-hitung (t-statistik) yang kemudian dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan derajat bebas (α ; nT-n-k-1).

1. Untuk variabel Rata-rata bersekolah diperoleh nilai $t_{hitung} = -9,235$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 1,978$. Karena nilai $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ maka peneliti dapat mengambil keputusan untuk menolak H_0 . Keputusan ini juga dapat diambil dengan memperhatikan nilai p-value sebesar **0,0000** yang lebih kecil dari alpha 0,05. Karena p-value < alpha (5%) maka dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% bahwa variabel Rata-rata Lama Bersekolah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Persentase Kemiskinan pada 33 wilayah penelitian. Koefisien Rata-rata Lama Bersekolah sebesar **-2,202** memiliki makna jika terjadi kenaikan Rata-rata Lama Bersekolah satu tahun akan menyebabkan persentase kemiskinan menurun sebesar 2,202 persen.
2. Untuk variabel Persentase Pengangguran diperoleh nilai $t_{hitung} = 17,519$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 1,987$. Karena nilai $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ maka peneliti dapat mengambil keputusan untuk menolak H_0 . Keputusan ini juga dapat diambil dengan memperhatikan nilai p-value sebesar

0,0000 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Karena p-value < alpha (5%) maka dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% bahwa variabel Persentase Pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Kemiskinan pada 33 provinsi di Indonesia. Koefisien Persentase Pengangguran sebesar 0,6776 memiliki makna jika terjadi kenaikan Persentase Pengangguran sebesar 1 persen akan menyebabkan Persentase Kemiskinan meningkat sebesar 0,6776 persen.

Lampiran 15

3. Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Weighted Statistics			
R-squared	0.992242	Mean dependent var	21.27843
Adjusted R-squared	0.990214	S.D. dependent var	10.90563
S.E. of regression	1.077076	Sum squared resid	150.8120
F-statistic	489.0536	Durbin-Watson stat	1.524045
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dengan memperhatikan nilai *R-Square* sebesar 0,9902 maka dapat dinyatakan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan keragaman nilai pada variabel persentase kemiskinan sebesar 99,02 persen sedangkan sisanya 0,98 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang berada di luar model penelitian.

***Kecurigaan terhadap adanya regresi yang *spurious* (regresi palsu) terbantahkan karena nilai *R-square* yang lebih kecil dari statistik Durbin Watson (Granger dan Newold dalam Nachrowi Usman, hal 365).

RIWAYAT HIDUP



Sugiarti. Lahir di Jakarta, 07 Juni 1987, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Sagin dan Ibu Rogayah. Beralamat di Perum. Margahayu Jaya Blok B Jl. Mawar Raya No. 167 Rt. 003 Rw. 020, Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Barat.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh, sekolah dasar di SDN I Bulak Jaya Bekasi, SLTPN 2 Bekasi, SMK Karya Bhakti I Bekasi (Lulus Tahun 2006). Kemudian penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi melalui jalur mandiri (PENMABA) tahun 2008.

Pengalaman organisasi yang pernah diikuti selama di kampus yakni pada Komunitas ERA (*Education Radio Campus*) sebagai staff Controll Announcer dan sebagai penyiar di ERA FM periode 2008-2009.